

PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	21-9-2006
Asal Dari	file - sospol
Banyaknya	1(satu) eksemplar
Harga	H
No. Inventaris	341/21-9-6
Klas	B4780

Oleh:

NUR MIRHAM

E 121 02 057

SKRIPSI

*Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan*

JURUSAN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2006

HALAMAN PENGESAHAN



JUDUL SKRIPSI : PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NAMA MAHASISWA : NUR MIRHAM

NOMOR POKOK : E 121 02 057

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

JURUSAN : ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN

Makassar,

2006

Menyetujui

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. a)', positioned below the name of the first supervisor.

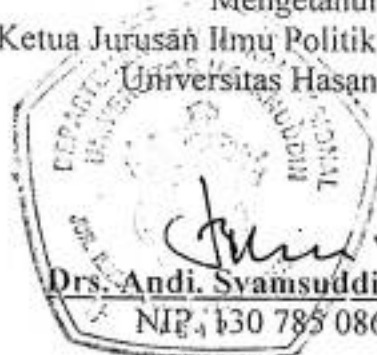
Dr. Hasrat Arief Saleh, MS.
NIP: 131 878 520

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Murfhi', positioned below the name of the second supervisor.

A. Murfhi, S.sos, M.Si.
NIP: 132 288 517

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan
Universitas Hasanuddin



Drs. Andi. Svamsuddin, M.Si
NIP: 130 785 086

HALAMAN PENERIMAAN

JUDUL SKRIPSI : PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NAMA MAHASISWA : NUR MIRHAM

NOMOR POKOK : E 121 02 057

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

JURUSAN : ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN

Telah diterima oleh panitia Ujian Skripsi Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Politik Pemerintahan dan program studi Ilmu Pemerintahan.

Panitia Ujian

Ketua : Drs. H.A. Gau Kadir, MA

()

Sekretaris : H.Suhardiman S, S.sos.M.Si

()

Anggota : 1. Dr. Hasrat Arief S, M.S

()

2. Dra. Hj Nurlinah M, M.Si

()

3. Drs. A. M. Rusli, M.Si

()

ABSTRAKSI

NUR MIRHAM, E 121 02 057, *PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT*, di bawah bimbingan Hasrat Arief Saleh selaku Konsultan I dan Andi Murphi selaku Konsultan II. Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Tulisan ini bertujuan, *pertama*, Untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan di daerahnya. *Kedua*, untuk mengetahui bentuk-bentuk peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah tersebut, sehingga mampu untuk mencapai tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Wawancara, dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara) untuk memperoleh keterangan yang diperlukan; Pengumpulan data sekunder dari instansi-instansi yang dianggap perlu; Observasi dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif sedangkan data kuantitatif yang bersifat kualitatif digunakan untuk memperkuat analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada begitu banyak potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa Barat dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan di daerahnya. Untuk saat ini, sumberdaya alam yang memberi kontribusi terbesar bagi PAD di Kabupaten Sumbawa Barat masih didominasi oleh sektor pertambangan. Sedangkan sektor lain yang juga berpotensi besar untuk ditingkatkan adalah dari sektor pertanian dalam arti luas.

Dari sektor sumberdaya manusia, SDM di Kabupaten Sumbawa Barat baik dari segi kualitas maupun kuantitas dinilai masih sangat kurang. Dari segi kuantitas, penduduk Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah sekitar 100.000 jiwa. Jumlah tersebut dinilai masih sangat kurang, sebab masih belum bisa untuk melakukan pembangunan dalam bidang jasa. Dari segi kualitas, penduduk Kabupaten Sumbawa Barat juga dinilai masih rendah karena dari rata-rata lama pendidikan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 6,8 tahun atau masih setara Sekolah Dasar. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat menjaoi prioritas utama pembangunan pemerintah dalam masa pemerintahan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat yang baru terpilih pada pilkada Juni 2005 lalu. Komitmen pemerintah dalam hal tersebut dapat dilihat pada dikeluarkannya kebijakan pemerintah untuk pendidikan gratis, pengobatan kesehatan gratis, pembuatan akta kelahiran gratis, pembuatan KTP gratis, penghapusan retribusi kebersihan/persampahan. Jika mengacu pada pos penerimaan dari sektor retribusi daerah, maka dapat dilihat dengan jelas bentuk komitmen pemerintah tersebut dengan turunnya perkiraan penerimaan dari pos

retribusi daerah pada tahun anggaran 2006 sebesar 18 % jika dibandingkan dengan perkiraan penerimaan pada tahun anggaran 2005.

Dari hasil penelitian juga dapat dilihat bahwa masih ada begitu besar peluang yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terutama berasal dari sektor pertanian dalam arti luas (perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan). Oleh karena itu, ke depan, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat mencanangkan untuk membangun sektor sekunder yang dalam hal ini adalah agroindustri sebagai sektor pembangunan utama dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, kesehatan, kesabaran, ketekunan, dan kepasrahan. sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa manusia dari kondisi jahil ke alam yang penuh cahaya dan kedamaian.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda **Abdullah Nur, BA** dan ibunda **Zaifah** yang selalu mendukung tiap gerak langkah, yang menunggu dengan penuh kesabaran, yang senantiasa mendoakan penulis di setiap ujung sujudnya kepada Sang Khalik. Juga buat kakakku **Nurul Hidayah** dan adikku **Nurul Zakiyah** yang telah menemaniku kuliah selama ini di tanah *Anging Mamiri*. Gapai cita-cita kita bersama untuk untuk membangun hari depan yang lebih baik dan indah.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **DR. Hasrat Arief Saleh, MS** selaku Pembimbing Pertama dan Bapak **A. Murphi, S.Sos.M.Si.** selaku pembimbing kedua sekaligus Penasehat Akademik Penulis. Terima kasih atas semua waktu, perhatian dan bimbingannya.
4. Bapak **Drs. A. Syamsuddin, MS.** Selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan.
5. Ibu **Hj. Rabina Yunus, M.Si.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.

6. Seluruh Staf Dosen dan Pegawai Jurusan Ipolpem dan Staf Pegawai Akademik Fisip Unhas atas segala bantuan dan kerjasamanya selama penulis menempuh studi di Jurusan Ipolpem Fisip Unhas.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atas segala bantuannya di saat penulis melakukan penelitian.
8. Keluarga Besar Bapak **A. Hamid Guniaty** atas segala dukungannya dan bantuannya selama ini sehingga penulis bisa tetap semangat dalam menyelesaikan setiap jenjang studi yang penulis lalui.
9. Teman-teman Pemerintahan Fisip Unhas, yang telah memberikan pelajaran hidup, organisasi dan arti sebuah persaudaraan dan persahabatan. **Kakak-kakak 2000, 2001, Teman-teman Interruption '02, Konstitusi '03, Kybernology '04/ So4, dan Revolusioner 05.**
10. Paduan Suara Mahasiswa Unhas. tempatku dalam menghilangkan segala kepenatanku di saat bosan. suntuk oleh segala macam permasalahanku. **Kak Arieck, Kak Asly, Kak Azmar, Adho, Kak Thia, Kak Doni.** Satu warna yang berbeda dalam hidupku ketika aku berlatih dan bernyanyi bersama kalian semua. Yang telah memberikanku kesempatan untuk mengukir pengalaman jauh di negeri orang. Teman-teman tim PSM Goes to World Choir Games di Xiamen, China. (Sopran; **Yossy, Yuntris, Dini, Sukma, Risna, Maya, Yanti, Vanda, Santi, Eky.** Alto; **Ida, Dhani, Ester, Kak Inna, Elsa, Wahdah.** Tenor; **Kak Belly, Kak Manca, Fatur, Ardi, Mawan, Raymondo.** Bass; **Kak Dudik, Ridha, Hafid, Budi, Fadil, Buffon, Arul, Kiki, Uya, dan Yonas.**

Untuk teman-teman anggota baru yang lainnya yang belum berkesempatan untuk berprestasi di ajang internasional, jangan berkecil hati sebab Graaz, Austria

menunggu kalian di tahun 2008. Ayo ukir prestasi yang lebih dalam dan berkesan daripada yang dicapai dari tim yang ke Xiamen, China.

11. Keluarga besar Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Sumbawa – Makassar (IKPMS-Mks) sebagai tempat kumpul-kumpul ketika penulis rindu akan kampung halaman yang nun jauh ada di seberang lautan.
12. Perempuan-perempuan yang telah memberi kedamaian dan mengisi relung hatiku yang terdalam, yang telah melecut semangat hidupku agar tetap berkobar serta lebih tabah dan sabar dalam mengarungi samudra kehidupan, yang telah membuat hari-hariku begitu indah dan berarti dalam setiap detik yang berlalu, yang membuatku banyak belajar tentang bagaimana menghargai dan menghormati jiwa-jiwa halus serta arti sebuah perasaan yang berasal dari sekerat daging dalam dada makhluk Tuhan yang paling misterius. Terima kasih atas semua bentuk apresiasi perasaan kalian kepadaku.
13. Pondok Stand Asia Crew. Arul, Mochba, Gufran dan Ustadz Subhan yang selalu menjadi tempat diskusi dan ngobrol yang menyenangkan. Terima kasih atas rasa persaudaraan yang kalian bangun untukku.
14. Untuk semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perjalanan studi penulis hingga saat ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu di sini.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya ke depan serta dapat juga bermanfaat bagi para pembaca yang mulia sekalian.

Sumbang saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan penulis. Terima kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Penerimaan.....	iii
Abstraksi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4. Kerangka Konseptual.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	21
1.5.1. Dasar Penelitian.....	21
1.5.2. Tipe Penelitian.....	21
1.5.3. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	21
1.5.4. Populasi dan Sampel.....	21
1.5.5. Teknik Penggumpulan Data.....	21
1.5.6. Analisis Data.....	23
1.6. Defenisi Operasional.....	23
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	31
2.1. Pengertian Umum.....	31
2.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.....	33
2.3. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah.....	40

III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	58
3.1. Sejarah.....	58
3.2. Letak Geografis.....	63
3.2.1. Letak dan Keadaan Alam.....	63
3.2.2. Topografi Wilayah.....	65
3.2.3. Luas dan Sebaran Lahan.....	66
3.2.4. Iklim dan Curah Hujan.....	67
3.2.5. Sektor-sektor Ekonomi.....	68
3.2.5.1. Pertanian dalam Arti Luas.....	68
3.2.5.2. Pertambangan.....	71
3.2.5.3. Industri dan Kerajinan.....	72
3.2.6. Pulau-Pulau Kecil.....	73
3.3. Kependudukan.....	73
3.3.1. Penduduk.....	73
3.3.2. Tenaga Kerja.....	76
3.3.3. Keagamaan.....	77
3.3.4. Pendidikan.....	78
3.4. Pemerintahan.....	79
IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	82
4.1. Potensi Sumberdaya Alam di Kabupaten Sumbawa Barat.....	82
4.1.1. Pertambangan.....	82
4.1.2. Pertanian.....	84
4.1.3. Kehutanan.....	87
4.1.4. Perikanan.....	89
4.1.5. Peternakan.....	95
4.1.6. Perkebunan.....	97
4.2. Potensi Sumberdaya Manusia di Kabupaten Sumbawa Barat.....	100
4.3. Pelaksanaan Kewajiban Daerah sebagai Daerah Otonom.....	102
4.3.1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat.....	102
4.3.2. Peningkatan Pelayanan Dasar Pendidikan.....	104

V. PENUTUP	146
5.1. Kesimpulan	146
5.2. Saran	149
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.3.1.1 : Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat
- Tabel 3.3.2.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan Kelompok Umur
- Tabel 3.3.3.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan Agama
- Tabel 3.3.4.1 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat
- Tabel 4.3.7.1 : Kontribusi Masing-masing Sektor terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa Barat

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.4.1 : Bagan Alur Fikir Kerangka Konseptual
- Gambar 3.2.1.1 : Peta Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat
- Gambar 3.4.1 : Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat
- Gambar 4.3.6.1 : Peta Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten Sumbawa
Barat tahun 2015
- Gambar 4.3.6.2 : Peta Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten
Sumbawa Barat

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan, negara Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan di dalamnya yang mempunyai kedaulatan. Oleh karena Negara Indonesia itu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Dalam negara kesatuan, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Kesatuan-kesatuan pemerintahan lain di luar pemerintah tidak memiliki apa yang disebut oleh R. Kranenburg sebagai *pouvoir constituant* yaitu kekuasaan untuk membentuk UUD/UU dan organisasinya sendiri.¹ Ditegaskan pula Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat.² Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara konstitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik.

Karena negara Indonesia menganut paham demokrasi, maka pada dasarnya semua kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah milik rakyat. Lalu melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, rakyat menyerahkan kewenangan

¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta; Grasindo, 2005. halaman 6

² Undang-Undang Dasar 1945 pasal pasal 1 ayat (2) dan (3)

kepada presiden. Presiden membentuk pemerintahan pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat memiliki semua kewenangan pemerintahan. Dalam konteks negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan, maka kedaulatan negara adalah tunggal, tidak tersebar pada negara-negara bagian seperti pada negara federal/serikat. Karena itu, pada dasarnya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi atau penghalusannya, yaitu dekonsentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah pusat mencakup semua kewenangan urusan pemerintahan yang berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia.

Namun mengingat wilayah negara Indonesia yang sangat besar dengan rentang geografis yang luas dan kondisi sosial budaya yang beragam, UUD 1945 kemudian mengatur perlu adanya pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa :

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang" [ayat (1)]

"Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan" [ayat (2)]

Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Ada 3 unsur utama yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut UNDP yaitu negara (*the state*), pasar / swasta (*the private sector*), dan masyarakat (*society*).² Hubungan antara ketiga unsur utama di atas, diharapkan mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998:139).³ Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tidak didasarkan pada pemerintah (*government*) atau negara saja, tapi juga harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam intern birokrasi maupun di luar birokrasi publik (masyarakat).⁴

² Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia, Surabaya, 2001. Hal 20

⁴ Ibid. Hal 1

⁵ Ibid. Hal. 1

Karakteristik *good governance*⁶ tidak bisa diwujudkan manakala penyelenggara pemerintahan yang baik tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk membuat keputusan sendiri berdasarkan aspirasi rakyat setempat sesuai dengan kondisi, potensi dan karakteristik yang dimilikinya. Kewenangan yang dimiliki untuk membuat keputusan sendiri sering disebut dengan desentralisasi. Karenanya menyoal tentang *good governance* tidak bisa melepaskan diri dari masalah desentralisasi, dan menyoal desentralisasi maka tidak bisa melepaskan diri dari pembahasan tentang pemerintahan daerah sebagai konsekuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi.

Pemerintah daerah (kepala daerah beserta jajarannya) dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan di daerah, memiliki kewenangan penuh –sebagaimana yang dibebankan undang-undang kepada mereka- dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah berdasarkan segala potensi yang dimiliki dan aspirasi yang berasal dari masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah haruslah dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang, guna tercapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah tentulah harus teliti dalam mendata dan mengenali segala potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Potensi-potensi yang dimiliki oleh sebuah daerah dalam melakukan pembangunan, tidak hanya mengacu pada potensi sektor sumber daya alam yang dapat

⁶ Demokrasi, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, berorientasi pada kepentingan rakyat, dan kerangka hukum. (untuk lebih jelas baca Joko Widodo. Hal. 25-30)



meningkatkan bidang ekonomi saja, namun juga harus melihat potensi sumber daya manusia yang ada.

Berdasarkan data dan fakta tentang potensi yang dimilikinya sekarang, pemerintah daerah dapat melihat prospek bagaimana arah pembangunan yang akan dilakukannya ke depan dengan memanfaatkan segala apa yang dimilikinya. Kebijakan tentang pemanfaatan potensi daerah yang ada, tidak boleh hanya dilihat dari segi positifnya saja, namun harus juga dilihat dari segi negatifnya juga, yang dalam hal ini adalah kelemahan yang dimiliki oleh daerah dalam memaksimalkan potensi yang ada dan juga segala tantangan dan hambatan yang akan mungkin dihadapi dalam proses pelaksanaan pemerintahan ke depan.

Kabupaten Sumbawa Barat, merupakan satu dari 63 daerah pemekaran⁷ di Indonesia yang melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung di daerahnya. Dengan 5 buah kecamatan yang tercakup dalam wilayahnya yaitu, kecamatan Taliwang, kecamatan Jereweh, kecamatan Seteluk, kecamatan Brang Rea, dan kecamatan Sekongkang, kabupaten Sumbawa Barat akan membangun daerahnya dengan didukung oleh hasil sumber daya alamnya berupa tambang emas yang kini dieksplorasi dan dieksploitasi oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Dari segi sumber daya aparatur pemerintahannya, Kabupaten Sumbawa Barat memerlukan sebanyak 2.018 karyawan yang harus mengisi personel di 11 dinas, 4 badan, dan 5 kantor. Dari total karyawan yang diperlukan tersebut baru terpenuhi sebanyak 75% yang dimutasi

⁷ Abdul Asri Harahap, Manajemen & Resolusi Konflik Pilkada. Jakarta; Pustaka Cidesindo, 2005. Halaman 14.

1.2. Rumusan Masalah

Seiring dengan fenomena yang dipaparkan di atas, tersirat beberapa buah pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana potensi yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan di daerahnya?
2. Apa sajakah bentuk-bentuk peluang dan hambatan yang dihadapi oleh daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah tersebut?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan di daerahnya.
- b) Untuk mengetahui bentuk-bentuk peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah tersebut.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

- a) Diharapkan tulisan ini, dapat menjadi bahan acuan atau referensi yang dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa ilmu pemerintahan dalam mengembangkan ilmu pemerintahan ke arah yang lebih baik dan berkualitas.

- b) Bahan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.
- c) Dapat menjadi bahan pemikiran bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Sumbawa Barat dalam membangun daerahnya guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Kerangka Konseptual

Sejalan dengan keharusan membentuk pemerintahan daerah dalam sistem administrasi negara Indonesia, maka sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang negara Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah : Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Melalui undang-undang tersebut bangsa Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahannya.

Pada dasarnya kewenangan pemerintahan baik politik maupun administrasi dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hakekatnya tidak mempunyai kewenangan pemerintahan. Pemerintah daerah baru mempunyai kewenangan pemerintahan setelah memperoleh penyerahan dari pemerintah pusat.

Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan ini melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Dalam konteks negara kesatuan penerapan asas sentralisasi dan desentralisasi dalam organisasi negara bangsa tidak

bersifat *dikotomis* ⁹ melainkan *kontinum*. ¹⁰ Artinya pemerintah pusat tidak mungkin menyelenggarakan semua urusan pemerintahan di tangannya secara sentralisasi atau sebaliknya pemerintah daerah sepenuhnya menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang diserahkan. Yang bisa dilakukan adalah selalu terdapat urusan-urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan secara sentralisasi oleh pemerintah pusat penghalusannya, dekonsentrasi. Tetapi tidak pernah terdapat urusan-urusan pemerintahan apapun yang diselenggarakan sepenuhnya secara desentralisasi. Urusan pemerintahan yang menyangkut kepentingan dan kelangsungan hidup bangsa dari bernegara lazimnya diselenggarakan secara sentralisasi dan dekonsentrasi. Urusan-urusan yang mengandung dan menyangkut kepentingan yang tertentu itu diselenggarakan secara desentralisasi. (Syaiful Anam, 1997:34). ¹¹

Dengan demikian, terdapat urusan-urusan yang diselenggarakan secara sentralisasi seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, keuangan, or fiskal nasional, dan agama. Dan tidak pernah ada urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Kalau pun ada urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, bukan berarti pemerintah pusat menyerahkan semua tanggungjawabnya. Karena tanggungjawab pemerintah pusat atas keputusan, atau pemerintahan ada pada pemerintah pusat, maka pemerintah pusat tetap mengorganisasi wilayah, satuan menyerahkan 100% urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, dan organisasi non

⁹ Diartikan sebagai 'dalam dua ruane yang terpisah'
¹⁰ Diartikan sebagai 'satu rangkaian kesatuan'

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sendiri mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan desentralisasi diwujudkan dengan pemberian otonomi (hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada) kepada daerah otonom. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Menurut Nurcholis dalam *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, pemerintahan baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi utama: 1) memberikan pelayanan / *sevices* baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik / khalayak, 2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*development for economic growt*), dan 3) memberikan perlindungan / *protective* masyarakat.¹³ Dari ketiga fungsi pemerintahan di atas, dapat dilihat bahwa tujuan akhir dari sebuah pemerintahan adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah daerah harus melakukan pelayanan kepada masyarakatnya.

¹³ Hanif Nurcholis, op cit, hal. 179

Untuk menjalankan pemerintahan di daerah yang melakukan pelayanan kepada masyarakat tentulah ada penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini, penyelenggara pemerintahan di daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pada dasarnya pembentukan satu daerah dalam struktur negara Indonesia sebagai subsistem, dimaksudkan demi meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Mengingat begitu rumitnya dan menyangkut banyak segi kegiatan, maka pertimbangan pembentukan satu daerah baru harus di lihat dari banyak faktor, diantaranya :

- a. kemampuan ekonomi calon daerah baru
- b. potensi daerah ke masa depan
- c. luas daerah
- d. jumlah penduduk yang sudah ada
- e. pertimbangan aspek sosial politik
- f. sosial budaya
- g. pertahanan dan keamanan.

Di samping faktor di atas, perlu pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Pada prinsipnya pembentukan daerah baru dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Kabupaten Sumbawa Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumbawa. Seperti yang dijelaskan dalam konsideran Undang-Undang tersebut yaitu :

- (a) bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Sumbawa, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Sumbawa perlu dimekarkan.
- (b) bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisis sosial politik, jumlah pendduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (c) bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah.¹⁴

Dengan demikian, jelaslah bahwa pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat bertujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan,

¹⁴ Undang-undang No. 30 Thn. 2003

pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah berdasarkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya.

Secara tidak langsung, kebijakan otonomi daerah dalam hal ini pemekaran daerah dengan pembentukan kabupaten baru memberikan *public sphere* yang lebih luas dan berkembangnya tradisi politik yang berciri lokal. Dengan adanya otonomi daerah, masyarakat lokal memiliki kesempatan yang lebih luas dalam melakukan kreasi sesuai dengan tradisi-tradisi yang berkembang di daerahnya. Tentu banyak hal yang dapat dilakukan dengan upaya masyarakat untuk menentukan kapasitas dan kemampuan seorang calon pemimpin di tingkat lokal. Proses seleksi pemimpin di daerah semakin memberi peluang terhadap munculnya pemimpin-pemimpin yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Artinya, terbuka lebar kesempatan bagi sejumlah putra daerah yang mempunyai kualitas dan kapasitas yang memadai untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka pun mampu memimpin daerahnya.¹⁵

Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 semakin memberikan keleluasaan gerak kepada daerah (baca : masyarakat) untuk memilih sendiri pemimpinnya. Warga masyarakat di daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara Republik Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang juga merupakan hak asasi mereka,

¹⁵ Hery Susanto, dkk. *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal (Pikiran dan Konsepsi Syauckani HR.)*. Jakarta; Millenium Publisher, 2003.



yang telah dijamin dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki, harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

Berbeda dengan semua Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya (1945-1999), maka dalam UU No. 32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur secara panjang lebar tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 56-119. Dari jumlah pasal, nyaris UU Nomor 32 Tahun 2004 seakan-akan khusus diadakan untuk mengatur tentang pemilihan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk provinsi, kabupaten, dan kota.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memperkenalkan pemilihan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh pemilih daerah masing-masing dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keyakinan Pilkada akan sukses walau di sana sini masih ada kelemahan, bersumber dari pengalaman pemilihan langsung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. Pemilihan langsung pasangan calon presiden dan wakil presiden telah membuka horison baru dalam penerapan demokrasi di Indonesia, yang dimungkinkan lewat Amandemen UUD 1945 serta tuntutan pembaharuan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

Sebenarnya, pemilihan langsung kepala daerah tidak merupakan hal yang baru dan asing, karena sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang kita telah mengenal

pemilihan kepala desa secara langsung di daerahnya, yang berlaku untuk hampir semua desa di seluruh Indonesia. Memang diakui pemilihan kepala desa di seluruh Indonesia. Memang diakui pemilihan kepala desa masih dalam “pesta kecil” dan melibatkan skala pemilih yang hanya mencapai ribuan orang, tetapi prinsip dasarnya adalah sama dengan pilkada yang cukup populer pada pertengahan tahun 2005. Mungkin proses pilkada ini akan mempercepat proses pendewasaan demokrasi di Indonesia, dan sekaligus proses pendidikan politik yang tepat dan langsung dirasakan oleh rakyat yang mempunyai hak pilih dan juga bagi kaum (generasi) muda yang melihat langsung bagaimana proses demokrasi langsung itu berlangsung. Harus siap untuk menang dan untuk kalah.

Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkadal), merupakan momentum penting paling strategis dalam memilih pemimpin yang berkualitas serta dapat diterima secara umum sehingga dukungan yang luas dapat diperoleh, tidak hanya dukungan secara horizontal, tetapi juga vertikal dari elit politik yang ada di tingkat nasional dan pemerintah pusat. Dengan pemberian otonomi yang luas, masyarakat daerah mewujudkan impiannya untuk mengatur daerahnya melalui pemimpin yang dipercaya dan kapabel. Melalui pilkada yang demokratis, diharapkan tidak ada lagi klaim-klaim sepihak dan sakwasangka terhadap siapa yang paling berhak memimpin suatu daerah. Jika ada sebagian masyarakat yang merasa mampu dan berhak memimpin daerah, maka kinilah saatnya ambisi itu diwujudkan dengan cara-cara yang damai melalui pilkada langsung. Ke depan, pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah dilakukan oleh berbagai daerah di Indonesia ini, mampu untuk

menghasilkan kepala daerah yang benar-benar mampu untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu dampak positif dari diterapkannya UU No. 32 Tahun 2004 sekaligus sebagai salah satu wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang dibagi ke dalam beberapa asas yang diambil dari UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), ditambah asas efisiensi dan asas efektifitas. Kemudian dalam pasal 20 Undang-undang 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa asas-asas tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Asas-asas tersebut dirinci antara lain

1. asas kepastian hukum.
2. asas tertib penyelenggaraan negara
3. asas kepentingan umum
4. asas keterbukaan
5. asas proporsionalitas

6. asas profesionalitas

7. asas akuntabilitas

8. asas efisiensi

9. asas efektifitas

Hal ini sekarang lebih dikenal dengan sebutan "good governance" (tata pemerintahan yang baik).

Ada 3 unsur utama yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut UNDP yaitu negara (*the state*), pasar / swasta (*the private sector*), dan masyarakat (*society*). Di antara tugas terpenting negara pada masa ke depan adalah mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Institusi pemerintah akan memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan, memelihara harmonisasi sosial, ketertiban dan keamanan, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan umum bagi warga negara. Institusi pemerintah juga perlu memberdayakan rakyat. Mereka dikehendaki memberikan layanan kepada masyarakat, bukannya dilayani oleh masyarakat.

Sektor swasta dan pasar jelas memainkan peran penting dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan pasar. Ini diperlukan untuk menciptakan kondisi dimana produksi barang dan jasa berjalan dengan baik dengan dukungan dari lingkungan yang mapan untuk melakukan aktivitas sektor swasta dan dalam suatu bingkai kerja incentives and rewards secara ekonomi bagi individu dan organisasi yang memiliki kinerja baik.

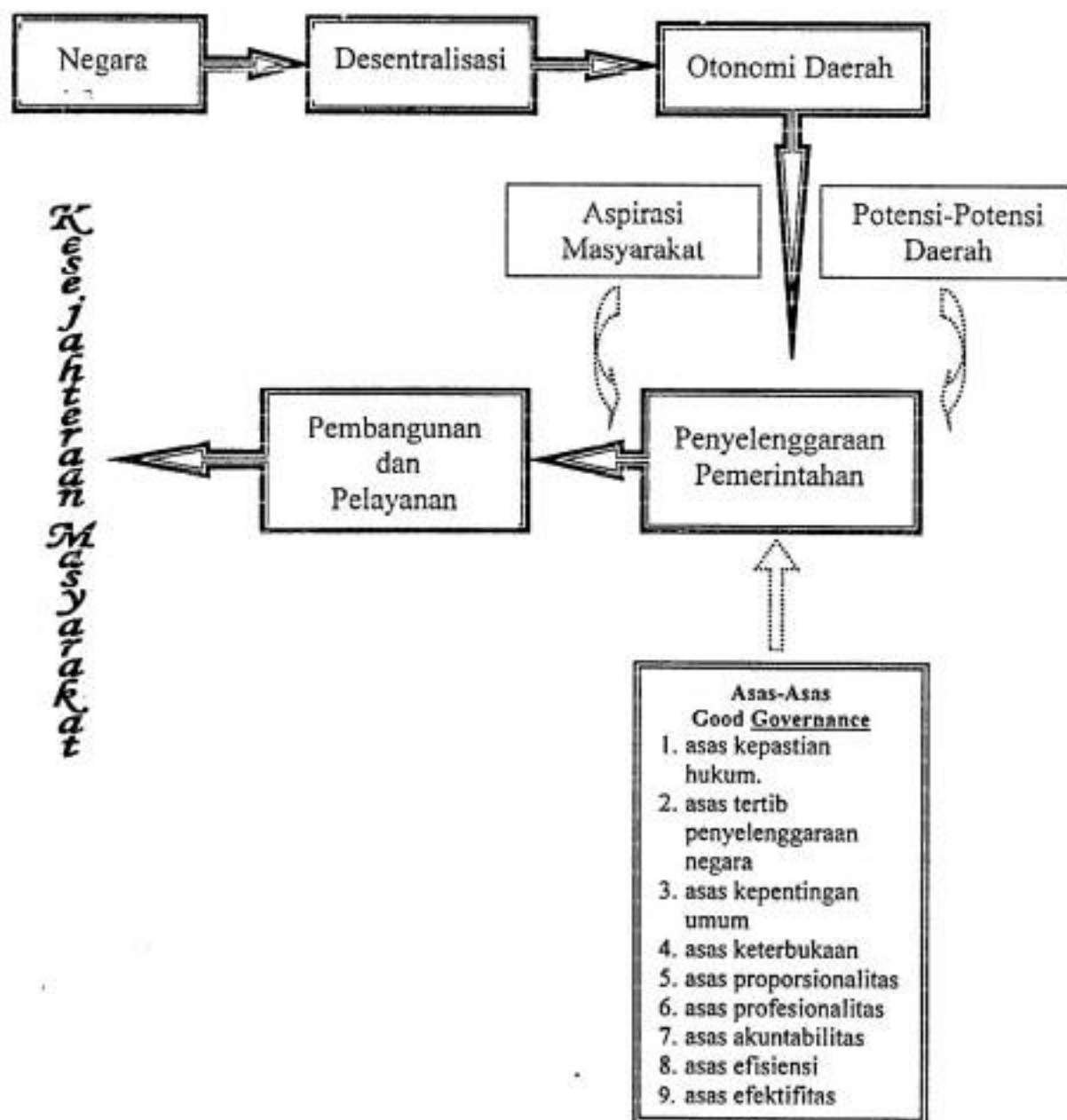
Masyarakat melalui organisasi masyarakat sipil yang memfasilitasi interaksi sosial dan politik dan yang memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik. Organisasi masyarakat sipil tidak hanya melakukan *check and balance* terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta, tetapi mereka dapat juga memberikan kontribusi dan memperkuat kedua unsur utama yang lain. Organisasi masyarakat sipil dapat membantu memonitor lingkungan, penipisan sumber daya, polusi dan kekejaman sosial, memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi. Selain itu, organisasi masyarakat sipil dapat menyalurkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan ekonomi dan mengorganisasikan mereka ke dalam suatu kelompok yang lebih potensial untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai salah satu elemen penting dalam *good governance*, masyarakat diharapkan bukan hanya sebagai objek penderita dari perselingkuhan yang dilakukan oleh pemerintah bersama pihak swasta.

Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari suatu penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan harga mutlak yang harus diwujudkan oleh penyelenggara pemerintahan daerah dimanapun berada. Untuk mencapai tujuan itu pemerintah daerah harus melakukan pelayanan kepada masyarakatnya. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat merupakan fungsi pelayananan pemerintah daerah. Artinya kesejahteraan masyarakat akan terwujud manakala pemerintah daerah

memberikan pelayanan publik yang baik. Tanpa adanya pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah, maka kesejahteraan masyarakat akan sulit terwujud.

Gambar 1
Bagan Alur Pikir Kerangka Konseptual



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Dasar Penelitian

Dalam penelitian ini, dasar penelitian yang di pakai adalah survei.

1.5.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai adalah deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberi gambaran dan penjelasan mengenai prospek yang dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah baru pemekaran dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya.

1.5.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian rencananya akan dilakukan selama 2 bulan yaitu bulan Februari dan Maret 2006.

1.5.4. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat termasuk di dalamnya seluruh aparat pemerintah beserta perangkat organisasi dan tata laksana pemerintahan yang dalam hal ini adalah kecamatan, kelurahan dan desa.

Penarikan sampel diambil dengan teknik *Non Probability Sample* dengan *Purposive Sample* dari unit-unit populasi yang dianggap sebagai informan kunci. Sampel diambil dengan pertimbangan bahwa responden/informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui atau berkompeten terhadap masalah yang dihadapi. Sampel diambil dengan maksud tidak mesti menjadi wakil dari

seluruh populasi, tetapi sampel memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian. Dengan demikian sampelnya adalah pejabat-pejabat (birokrat) yang duduk dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat mulai dari tingkat kabupaten hingga pada tataran kelurahan/desa yang dirinci sebagai berikut :

1. Bupati Sumbawa Barat	: 1 orang
2. Wakil Bupati Sumbawa Barat	: 1 orang
3. Anggota DPRD Sumbawa Barat	: 5 orang
4. Sekretaris Daerah Sumbawa Barat	: 1 orang
5. Kepala Bappeda Sumbawa Barat	: 1 orang
6. Kepala Dispenda Sumbawa Barat	: 1 orang
7. Kepala BKN Sumbawa Barat	: 1 orang
8. Kepala Dinas se- Sumbawa Barat	: 11 orang
9. Camat Se- Sumbawa Barat	: 5 orang
10. Tokoh Masyarakat	: 10 orang
11. LSM	: <u>5 orang</u>
Jumlah	: 43 orang

1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

Guna mengumpulkan data yang valid dan obyektif, maka peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu :

- Wawancara, dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara) untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.
- Pengumpulan data sekunder dari instansi-instansi yang dianggap perlu
- Observasi dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

1.5.6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang dihasilkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer kali ini akan digali dengan menggunakan hasil wawancara mendalam dengan para informan yang berkompeten di bidangnya. Data sekunder akan diperoleh dari lembaga-lembaga/kantor-kantor pemerintah dan juga non pemerintah/LSM yang mempunyai sumber data yang mendukung dalam penyelesaian tulisan ini.

Analisis data yang digunakan dalam penyelesaian tulisan ini dilakukan secara kualitatif, dengan menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara ditambah dengan data sekunder yang diperoleh. Kemudian data-data yang diperoleh, dianalisis untuk melihat apa-apa saja potensi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan, guna mencapai tujuan akhirnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

1.6. Defenisi Operasional

Peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, harus melihat pada kemampuan yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakatnya. Daerah tidak bisa

begitu saja membuat sebuah kebijakan dalam melakukan pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah haruslah pintar-pintar melihat peluang yang muncul, serta kekuatan yang ada pada dirinya dalam memanfaatkan peluang tersebut tanpa menafikan segala kelemahan yang ada dan juga kemungkinan hambatan yang akan menghadang. Mengenali jati diri sendiri akan lebih memudahkan untuk mengetahui bagaimana prospek penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Prospek yang dimaksud di sini adalah prospek yang berasal dari bahasa Inggris *Prospect*, yang berarti "harapan, kemungkinan". Jadi prospek dapat diartikan sebagai kemungkinan atau harapan baik dari sesuatu di masa yang akan datang. Dalam tulisan ini, prospek diartikan sebagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan perkiraan-perkiraan berdasarkan kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masa sekarang.

Prospek penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat ke depan, haruslah dilihat dari apa-apa saja yang ada dan terjadi sekarang ini. Potensi-potensi daerah yang ada sekarang ini haruslah mampu menjawab tantangan ke depan. Nah, potensi-potensi apakah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat dan sejauh mana telah dimanfaatkan, seperti yang dipertanyakan dalam rumusan masalah akan dijabarkan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan potensi adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi seperti yang tertuang dalam Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk

menjawab pokok permasalahan bagaimana potensi dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan di daerahnya, maka penulis menggunakan indikator-indikator:

a. Potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

► **Pertambangan**

1. Jenis tambang dan jumlahnya
2. Produksi
3. Penyebarannya
4. Permodalan
5. Tenaga kerja

► **Pertanian**

1. Luas lahan dan penyebarannya
2. Jenis tanaman dan produksinya
3. Intensitas penggunaan lahan
4. Sumber pengairan

► **Kehutanan**

1. Luas area hutan
2. Jenis hutan yang ada
3. Barang hasil hutan

► **Perikanan**

1. Jenis dan jumlahnya
2. Produktivitas

3. Penyebaran

► Peternakan

1. Jenis dan jumlahnya

2. Produktivitas

3. Penyebaran

► Perkebunan

1. Jenis dan jumlah

2. Produktivitas

3. Penyebaran

b. Potensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sumbawa Barat pada umumnya dan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada khususnya

► Kependudukan

1. Jumlah penduduk (dilihat dari segi usia, angkatan kerja, dan pendidikan)

2. Pertumbuhan penduduk

3. Persebaran penduduk

4. Konsentrasi dan kepadatan penduduk

5. Mata pencaharian

6. Pendapatan perkapita

► Sumber daya aparatur pemerintahan

1. Jumlah pegawai yang diperlukan

2. Jumlah pegawai yang tersedia
3. Cara perekrutan pegawai sebagai kabupaten yang baru
4. Kualitas SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah saat ini ditinjau dari tingkat pendidikannya
5. Tindakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam meng-*Up Grade* / meningkatkan kualitas pegawainya

c. Penyelenggaraan pemerintahan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terutama yang berkenaan dengan pemenuhan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi serta penerapan Asas Umum Penyelenggaraan Negara atau yang lebih dikenal dengan *good governance*. Dalam hal ini, poin-poin yang ingin diketahui adalah antara lain:

► Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat

1. Pendapatan perkapita
2. Tingkat pendidikan
3. Derajat kesehatan
4. Kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut

► Pengembangan kehidupan demokrasi

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada

► Peningkatan pelayanan dasar pendidikan

1. jumlah lembaga pendidikan yang ada
2. jumlah peserta didik
3. Jumlah gedung dan ruangan yang ada sekolah

4. Berapa jumlah tenaga guru
 5. kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut
- ▶ Penyediaan pelayanan kesehatan
 1. Jumlah lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
 2. Jumlah tenaga kesehatan yang ada
 3. Kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut
 - ▶ Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
 1. Jenis-jenis fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada
 2. Prioritas pembangunan
 - ▶ Perencanaan tata ruang
 1. Peta wilayah
 2. Peta topografi
 3. Peta iklim
 4. Peta penggunaan lahan
 5. Rencana detil tata ruang kota
 6. Rencana detil tata ruang wilayah
 - ▶ Sumber daya produktif daerah
 1. Sumber daya yang ada saat ini dan dimanfaatkan
 2. Sumber daya yang dipersiapkan untuk masa yang akan datang
 - ▶ Pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kewenangan daerah.
 1. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan

2. Kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

d. Keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

▶ Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba BUMD
4. Lain-lain PAD yang sah

▶ Dana perimbangan

▶ Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Hibah
2. Dana Darurat

▶ Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Yang dimaksud dengan peluang dalam tulisan ini adalah segala sesuatu yang bisa mendorong laju pembangunan di daerah yang dapat berupa tawaran investasi, tawaran kerjasama, kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang ada, kebutuhan akan produk lokal oleh pihak luar, baik yang berasal dari daerah lain maupun yang berasal dari luar negeri.

Yang dimaksud dengan hambatan adalah segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat/mengganggu jalannya

pembangunan, baik yang berasal dari luar daerah maupun dari daerah itu sendiri. Untuk menjawab pokok permasalahan apa sajakah bentuk-bentuk peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan maka penulis menggunakan indikator :

- a. Peluang yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan pembangunan di daerahnya.
 - ▶ Jenis peluang/kesempatan yang muncul
 - ▶ Sektor yang paling diminati oleh para investor
- b. Kekuatan-kekuatan apa sajakah yang dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa Barat dalam memanfaatkan segala peluang yang ada.
 - ▶ Potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah
 - ▶ Potensi sumber daya manusia
 - ▶ Potensi lain yang ada
- c. Kelemahan yang terdapat pada Kabupaten Sumbawa Barat sehingga dapat mengancam untuk tidak dapat memanfaatkan peluang yang muncul
 - ▶ Jenis dan macamnya
 - ▶ Asal kelemahan yang ada
- d. Tindakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menanggulangi segala kelemahan yang ada sehingga peluang yang muncul tidak sia-sia.
 - ▶ Kebijakan yang ada
 - ▶ Program pembangunan yang dibuat

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka, dalam penulisan sebuah laporan penelitian sangat penting digunakan untuk lebih memperjelas dan mempertegas laporan hasil penelitian dipandang dari aspek teoritisnya. Di dalam tinjauan pustaka berisi literatur-literatur yang berisi berbagai pendapat para ahli ataupun kutipan-kutipan yang berasal dari sumber lain (misalnya ; website, koran) yang berisi pembahasan mengenai masalah yang diteliti.

Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya, maka pada Bab II ini akan dijelaskan beberapa pengertian yang disertai dengan pendapat dari para ahli yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan laporan penelitian ini tinjauan pustaka meliputi pembahasan tentang pengertian umum, penyelenggaraan pemerintahan negara, dan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah.

2.1. Pengertian Umum

Pengertian prospek penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang mambentuknya. Sebagaimana diketahui, prospek penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur prospek, penyelenggaraan, dan pemerintahan. Dengan melihat secara divergensi dari setiap unsur tersebut, kemudian diambil suatu kesimpulan secara konvergensi, akan terbentuk suatu pengertian yang utuh.

Prospek yang dimaksud di sini adalah prospek yang berasal dari bahasa Inggris *Prospect*, yang berarti "harapan, kemungkinan". Menurut kamus Indonesia-Inggris oleh John M. Echols dan Hasan Sadily, PT. Gramediaa Jakarta, prospek adalah *future chances*. Jadi prospek dapat diartikan sebagai kemungkinan atau harapan baik dari sesuatu di masa yang akan datang. Dengan demikian, prospek diartikan sebagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan perkiraan-perkiraan berdasarkan kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masa sekarang.

Penyelenggaraan, jika diartikan dalam bahasa Inggris dapat disamakan dengan *implementation, organization, coordination*. Dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan *organization/pengorganisasian* sebagai persamaan dari penyelenggaraan.pengorganisasian menurut Dharma Setyawan Salam dalam bukunya *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, pengorganisasian adalah suatu usaha pengelompokan pekerjaan yang diatur melalui struktur organisasi sehingga setiap unit kerja mempunyai sasaran antara dalam rangka mencapai tujuan secara keseluruhan. G.R. Terry (1961) mengatakan, pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang terhadap kegiatan-kegiatan dari penyediaan factor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.



Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang kemudian terkait dengan kata perintah-perintah, paling sedikit memiliki empat unsur yaitu: ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan (Inu Kencana Syafei dalam Pengantar *Ilmu Pemerintahan*, 2001;20). Menurut C.F. Strong, pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar. Mac Iver menyatakan bahwa pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan.... bagaimana manusia itu bisa diperintah. Pemerintahan menurut Salam adalah kegiatan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara.

Dari ketiga pengertian sistem yang menyusun prospek penyelenggaraan pemerintahan dapat ditarik kesimpulan sebagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang dalam menyusun macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan perkiraan-perkiraan berdasarkan kecenderungan-kecenderungan/potensi yang ada pada masa sekarang.

2.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa cakrawala baru dalam sistem politik dan pemerintahan yang selama 32 tahun tidak pernah berubah dan cenderung bersifat stagnan. Karena itu, perubahan yang terjadi pada

saat ini dipandang sebagai suatu langkah baru di masa depan dengan dasar-dasar efisiensi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun perlu diingat bahwa reformasi selalu memerlukan waktu yang cukup panjang untuk bisa dilihat hasilnya yang konkret. Bahkan kalau kita melihat negara-negara lain yang melaksanakan reformasi, merkapun tidak selalu berhasil, ada yang gagal, ada yang setengah gagal, tetapi ada juga yang berhasil.¹

Tuntutan reformasi itu sendiri datangnya dari dua arah, yaitu secara internal dari masyarakat Indonesia dan secara eksternal sebagai bagian dari masyarakat global. Secara internal, tuntutan reformasi muncul akibat meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, terbukanya berbagai isolasi serta akses informasi yang mudah diperoleh. Kondisi ini menyebabkan masyarakat makin kritis dalam mencermati pengelolaan kekuasaan negara yang dianggap telah menyimpang dari komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat mulai berani menyatakan sikap dan mengungkapkan berbagai penyelewengan. Menurut Sarundajang, semua ini terjadi akibat munculnya *intelligence public opinion* sebagai akibat perkembangan teknologi informasi yang telah menembus berbagai isolasi yang ada dalam masyarakat.

Di sisi lain, secara eksternal, era globalisasi telah membuka berbagai keterkaitan antara negara, sehingga hamper tidak ada satu negara pun yang bebas dari pengaruh negara-negara lainnya. Globalisasi telah memberi peluang bagi

¹ Susilo Bambang Yudhoyono, dikutip oleh S.H. Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Kata Hasta Pustaka, 2005, hal. 3.

terciptanya kesepakatan bersama untuk mengelola pemerintahan dengan komitmen global. Salah satu komitmen global tersebut adalah munculnya Tata Dunia Baru (*The New World Order*) yang disepakati oleh negara-negara Eropa dan Amerika sebagai pijakan dalam mengelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dan *Public Accountability* dalam pemerintahan.²

Tuntutan global itu menempatkan isu demokratisasi dalam pemerintahan, di mana rakyat ditempatkan pada kedudukan yang penting. Lembaga pemerintahan harus mencari cara terbaik untuk mensejahterakan warganya, karena tugas pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Modernisasi dunia yang mengglobal dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat secara universal telah berimplikasi terhadap kompleksitas kehidupan masyarakat yang sekaligus menjadi tantangan pemerintah di berbagai negara di dunia. Untuk itu pembenahan yang fundamental serta sikap konsisten guna menyelenggarakan pemerintahan yang berparadigma baru, dengan wajah dan peran yang berdimensi *futuristik* serta berorientasi kepada masyarakat dengan kinerja yang efisien, sudah saatnya dipacu dan diimplementasikan secara kongkrit.

Beriringan dengan globalisasi tersebut, demokratisasi menjadi pilihan wajib kegiatan politik masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa hanya pemerintahan yang demokratislah yang dapat menempatkan manusia pada jati dirinya. Proses demokrasi itu sendiri sedang berlangsung di Indonesia, di mana

² Ibid, hal 3.

saluran-saluran yang dulunya dianggap menghambat demokratisasi telah dibuka secara lebar. Cita-cita ke arah pemerintahan yang demokratis akan dipengaruhi oleh dimensi sistem pemerintahan negara yang dianut. Presidensial, parlementer, referendum ataupun sistem campuran adalah pilihan yang akan diambil dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan negara.

Membentuk pemerintahan yang demokratis merupakan cita-cita setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Namun usaha itu dihadapkan pada persoalan tentang standar yang digunakan dan bisa diterima secara universal untuk mengukur pemerintahan dikatakan demokratis atau tidak. Kalau berpijak pada pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh Lincoln dalam Darwin (1995:181), *democracy is government from the people, government by the people, and government for the people.*³ Hal ini berarti pemerintahan dikatakan demokratis manakala dalam penyelenggaraan pemerintahan senantiasa melibatkan seluruh rakyat. Namun menurut Riswanda (1997:70) seperti yang dikutip Joko Widodo mengatakan bahwa bila setiap warga negara terlibat di dalamnya (*pemerintahan; penulis*), maka keberadaan sistem dan mekanisme politik menjadi tidak berarti sama sekali, segera disadari bahwa hal ini mustahil dilaksanakan. Para pakar yang lain sependapat bahwa satu pemerintahan dapat disebut demokratis, bila jaringan pembuatan keputusan melibatkan banyak unit politik, dan prosesnya transparan hingga rakyat dapat mengontrol ataupun memasukkan inisiatif baru lewat saluran yang disediakan oleh sistem politik seperti pemilu dan referendum.

³ Joko Widodo, Op. Cit. hal 99

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah bergeser dari paradigma "*rule government*" menjadi "*good governance*". Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma "*rule government*" senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan paradigma "*good governance*", dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah atau Negara saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik dalam intern birokrasi maupun dalam di luar birokrasi public (masyarakat).

Tata pemerintahan yang baik atau *good governance* dewasa ini sedang menjadi acuan dalam mencari dalam perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi. Dalam memahami konsep *good governance* muncul beragam perspektif dari sisi historis sampai kepada perkembangan konseptual. Menurut Nisjar dalam Sarundajang, *Good governance* sebagai sebuah pemikiran dasar diawali dengan paradigma *governance* yang cenderung berkembang dalam memasuki abad 21 berdasarkan mekanisme pasar (*market driven governance*) dan paradigma keterpaduan (*corporate* atau *clan system*).

Sebelum membahas lebih jauh tentang *good governance*, maka akan dibahas terlebih dahulu tentang perbedaan pengertian antara *government* dan *governance*. Kata pemerintah (*government*) identik dengan pengelola atau pengurus dengan makna spesifik pengelola atau pengurus negara. Kamus Bahasa Indonesia mempunyai terjemahan baku untuk kata pemerintah (*government*) sebagai “pemerintah” yang berasal dari kata perintah. Meskipun Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menerjemahkan pemerintah sebagai pengurus atau pengelola, namun pemahaman dasar semantik mengajarkan bahwa pemerintah adalah tukang memerintah.⁴

Sementara itu pemerintah (*government*) menurut pendapat C.F. Strong, dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara baik ke dalam maupun ke luar. W.S. Sayre mengemukakan pengertian pemerintahan dengan cara yang lebih sederhana yaitu sebagai lembaga negara yang terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah merupakan suatu badan penyelenggara atas nama rakyat untuk mencapai tujuan negara. Jadi pemerintah yang di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti yang mengatur, atau yang memerintah itu dapat diartikan sebagai lembaga eksekutif. Pemerintah seharusnya bekerja dengan baik atau *good government* yaitu harus transparan, akuntabel, punya daya tanggap yang tinggi terhadap tuntutan masyarakat, menegakkan hukum, professional dan yang paling penting bebas KKN. Apabila semuanya ini dapat dilaksanakan

⁴ S.H. Sarundajang, *op cit.* hal. 272

dengan baik, maka pemerintah tersebut dapat disebut sebagai pemerintah yang bersih atau *clean government*.

Konsep *governance* pada dasarnya berbeda dengan konsep *government*. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas (Ganie-Rochman, 2000:144).⁵ *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu keadaan kolektif (Ganie-Rochman, 2000;142). UNDP mengartikan *governance* sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk memanager urusan-urusan bangsa. Lebih lanjut UNDP menegaskan pemerintahan adalah suatu institusi, mekanisme, proses, dan hubungan yang kompleks melalui warga negara dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Kristiadi dalam Sarundajang (2005;271) mengatakan bahwa pemerintahan berwibawa dipilih sebagai terjemahan *good governance*. Kata *good* dalam konteks ini lebih memiliki arti "baik" yang terkait dengan kekuasaan dan hak memberi perintah yang harus ditaati (wibawa). UNDP merumuskan

⁵ Joko Widodo, op.cit. hal 18

good governance sebagai suatu *exercise* dari kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya.

Berbagai pola pikir *good governance* telah banyak yang dikemukakan praktisi dan teoritis dalam bidang administrasi publik dengan berbagai rumusan prosedur dan proses yang bisa dipergunakan untuk mencapai dan mengidentifikasi prinsip-prinsip dan asumsi-asumsi dari tata pemerintahan yang baik. Seperti halnya Miftah Thoha yang menyatakan bahwa tata pemerintahan yang baik itu merupakan sebuah konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara teratur dalam ilmu politik, terutama ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Konsep itu lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, *civil society*, partisipasi rakyat, hak azasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhir dasawarsa lalu, konsep tata pemerintahan yang baik itu lebih dekat dipergunakan dalam reformasi sektor publik.

Tata pemerintahan (*governance*) adalah proses kegiatan yang diseenggarakan oleh pemerintah. Istilah *governance* menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi dan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan demikian jelas bahwa kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahannya di mana pemerintah melakukan interaksi dengan pihak swasta

dan masyarakat. Oleh karena itu, tiga unsur penting yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan adalah negara (*state*), masyarakat (*civil society*), dan sektor swasta (*private sector*) yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi daerah. Ketiga unsur tersebut mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat dan saling mempengaruhi. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding, atau tidak terbukti, maka akan terjadi pembiasaan dari tata pemerintahan yang baik. Upaya menyeimbangkan ketiga unsur tersebut merupakan tugas birokrasi pemerintah. Jika peran yang dimainkan tidak mampu menjamin adanya kongruensi dan kohesiveness antara ketiganya, maka akan terjadi ketidakseimbangan, karena adanya kemungkinan satu komponen mempengaruhi bahkan mempengaruhi komponen lain (Sarundajang dalam *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, 2005:272).

2.3. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat, segera bisa diwujudkan manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah. Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah berarti desentralisasi dan otonomi daerah.

Dalam aspek potensi yang dimiliki daerah, pertimbangan perlunya pemerintahan daerah memiliki alasannya tersendiri. Potensi daerah yang merupakan kekayaan alam baik yang sifatnya dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, batubara, timah, tembaga, emas,

ataupun nikel, melahirkan pertimbangan khusus bagi pemerintah pusat untuk mengatur pemerataan daerah. Hasrat ini kemudian mewajibkan pemerintah (pusat, *penulis*) membentuk pemerintah daerah sekaligus pemberian otonomi tertentu untuk menyelenggarakan rumah tangga daerahnya. Dalam ini malah kecenderungan pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahan hingga mengakibatkan daerah kehilangan kreatifitas dan inovasi.

Berbagai macam pemikiran tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah di Indonesia melalui otonomi daerah (desentralisasi), sebenarnya bukan merupakan pemikiran baru. Bahkan para pendahulu kita sudah mengemukakan hal tersebut dalam UUD 1945. Ini berarti kepedulian terhadap pentingnya pemberian otonomi kepada daerah sudah terpikirkan sejak lama, yakni sejak Republik ini berdiri. Namun dalam perkembangannya selama ini, implementasi otonomi masih tersendat-sendat sehingga belum menampakkan hasil yang optimal.

Mengkaji masalah desentralisasi tidak bisa dilepaskan dengan masalah sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sentralisasi dan desentralisasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, pada dasarnya berkenaan dengan "*delegation of authority and responsibility*" yang dapat diukur dari sejauh mana unit-unit bawahan memiliki wewenang dan tanggung jawab di

dalam proses pengambilan keputusan (Miewald dalam Pamudji, 1984:2)⁶. Desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/ fungsionaris bawahannya sehingga yang diserahkan/dilimpahi: kekuasaan/wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut (Pide, 1997:34).⁷

Desentralisasi diartikan pula sebagai suatu sistem, dimana bagian-bagian dan tugas negara diserahkan penyelenggaraannya kepada organ yang sedikit banyak mandiri. Organ yang mandiri ini wajib atau berwenang melakukan tugasnya atas inisiatif dan kebijaksanaannya sendiri. Ciri yang penting bagi organ yang didesentralisasikan adalah mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai pelaksanaannya tugasnya. Desentralisasi adalah pelimphan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah (The Liang Gie dalam Pide, 1997:39)⁸. Satuan organisasi itu berikut wilayahnya disebut daerah otonom, wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat tersebut berikut kewajiban, tugas dan tanggungjawabnya tercakup dalam istilah pemerintahan daerah. Desentralisasi diartikan pula sebagai pemerintahan sendiri,

⁶ Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia. Surabaya, 2001.

⁷ Ibid. hal. 39

⁸ Ibid. hal. 39

atau hak atau kekuasaan untuk memerintah sendiri. Desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan dalam urusan kemasyarakatan dari pejabat-pejabat politik ke badan-badan pemerintahan yang relative otonom, atau pemindahan fungsi administrasi ke hirarki yang lebih bawah.

Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karenanya kebijakan yang dibuat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayaninya. Pemerintah lokal lebih mampu daripada pemerintah pusat dalam merespon perubahan tuntutan, melakukan eksperimen dan mengantisipasi perubahan-perubahan pada masa mendatang. Pemerintah lokal memberikan bentuk pemerintahan dalam mana rakyat dari kelompok-kelompok non produser dapat lebih mudah berpartisipasi hal ini terjadi karena kewenangan yang menyandarkan pada pemilih lokal bisa jadi dapat menjamin bahwa kebijakan lokal mencerminkan apa yang menjadi tuntutan lokal. Hal ini dikarenakan mereka sering melakukan kontak (hubungan) dengan masyarakat lokal, sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi masalah, tuntutan, keinginan, dan aspirasi masyarakat lokal dan membawanya ke dalam proses pembuatan kebijakan.

Pemilihan model penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan apakah sentralisasi atau desentralisasi, kedua-duanya sama-sama mempunyai implikasi. Model yang terlalu sentralistis tidak sepenuhnya baik, karena

pelaksanaan pemerintah dan pembangunan yang sentralistis kurang dapat memperhatikan kebutuhan, permasalahan dan sumber daya serta karakteristik khusus daerah. Hasilnyapun kurang dapat dinikmati dan menyentuh serta mencerminkan keinginan, kepentingan dan aspirasi masyarakat kebanyakan. Selain itu, juga dapat memperlemah inisiatif daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, efisiensi administrasi akan cenderung menurun seiring dengan meningkatnya tanggungjawab pusat, dan dapat mengurangi kadar demokrasi dalam sistem pemerintahan. Namun model sentralistis di samping memiliki kelemahan di atas, juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu akan dapat menjaga integrasi politik dan pengendalian pembangunan, sangat diperlukan jika kemampuan daerah masih rendah, memudahkan penyaluran dana luar negeri, mempercepat proses "*nation building*" dan terwujudkannya "*national unity*", dan mempermudah mobilisasi risorsis untuk pembangunan ekonomi dan mengurangi *gap* dalam pembangunan antar wilayah/provinsi.

Model penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang terlalu desentralistis juga menimbulkan konsekuensi. Masalah itu antara lain ketimpangan dan ketidakseimbangan pertumbuhan sosial ekonomi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Hal ini karena kondisi masing-masing daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Daerah yang surplus akan lebih besar kemungkinannya lebih maju dan berkembang, sementara daerah yang minus akan jauh ketinggalan. Kondisi tadi akan cukup bermasalah manakala ikatan nasionalismenya kurang kuat dan akan bisa menimbulkan

keresahan sosial dan ketidakstabilan politik, yang pada gilirannya akan dapat membahayakan keutuhan dan eksistensi negara yang bersangkutan.

Desentralisasi dipandang dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan luwes, atau dengan kata lain memberi dukungan yang lebih konstruktif di dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam organisasi ke tingkat yang lebih rendah akan cenderung memperoleh keputusan-keputusan yang lebih baik. Desentralisasi bukan saja dapat memperbaiki kualitas dari keputusan-keputusan yang diambil, tapi juga akan dapat memperbaiki kualitas dalam pengambilan keputusan. (Gregor dalam Pamudji, 1987:2)⁹.

Rondinelli (1990) seperti yang dikutip Joko Widodo dalam Good Governance Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, menggambarkan secara lebih jelas mengapa desentralisasi perlu dipilih dalam menyelenggarakan dan pembangunan. Desentralisasi akan dapat meningkatkan efektifitas dalam membuat kebijaksanaan nasional dengan cara mendelegir tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat tingkat lokal untuk merancang proyek-proyek pembangunan, agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Desentralisasi akan dapat memungkinkan para pejabat setempat untuk dapat lebih mengatasi masalah-masalah yang selama ini dianggap kurang baik dari cirri-ciri prosedur yang sangat birokratis di dalam merencanakan dan

⁹ Ibid. Hal. 42

melaksanakan pembangunan yang seringkali dialami oleh negara berkembang yang acap kali tercipta konsentrasi kekuasaan, otoritas dan sumber-sumber yang begitu berlebihan di tingkat pusat.

Osborne dan Gaebler, dalam *Mewirauahakan Birokrasi (1999:283)* mengemukakan bahwa ada beberapa keuntungan yang dapat diraih dengan diterapkannya sistem desentralisasi, yaitu:

- Pertama, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksibel daripada yang tersentralisasi. Lembaga lembaga tersebut dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan.
- Kedua, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih efektif dari pada yang tersentralisasi. Para pegawai yang berada di lini depan paling dekat dengan masalah dan peluang, dan mereka lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga akan cepat mengambil keputusan yang diperlukan.
- Ketiga, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif daripada yang tersentralisasi. Inovasi biasanya tidak terjadi karena seorang yang berada pada pucuk pimpinan, tetapi sering muncul dari gagasan yang baik dari pegawai yang benar-benar melaksanakan pekerjaan dan berhubungan dengan pelanggan.
- Keempat, lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen dan lebih besar produktivitasnya. Pemberian kepercayaan kepada pegawai untuk mengambil keputusan yang

penting dalam tugasnya dapat menjadi motivasi bagi mereka, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerjanya.

Desentralisasi pada dasarnya sudah menjadi suatu strategi dalam upaya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Mengingat kondisi geografis kepulauan yang luas dan keberagaman suku, ras, agama, adat, maupun kebudayaan, pola otonomi yang bernafaskan desentralisasi dalam berbagai aspek sangat diperlukan.

Akan tetapi, pelaksanaan desentralisasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu perlu diperhatikan beberapa hal yang memiliki kemungkinan yang dapat mempengaruhinya. Nilai-nilai strategis dan filosofis dari sebuah konsep desentralisasi perlu dirumuskan dengan hati-hati agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara umum nilai filosofis yang perlu dipahami baik oleh pemerintah pusat maupun daerah adalah bahwa desentralisasi bukan sekedar strategi untuk pelimpahan/penyerahan kewenangan, melainkan juga merupakan suatu sistem yang komprehensif yang melibatkan berbagai proses dan aspek di dalamnya, seperti proses koordinasinya, pelaksanaannya, pertanggungjawabannya, pengawasannya, berikut aspek-aspek kultur, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Keseluruhan hal tersebut akan diwarnai oleh nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai yang menjadi prinsip filosofinya.

Jika dilihat dari fungsi-fungsi pembangunan yang didesentralisir pada para pejabat, staf pelaksana pada tingkat lokal atau unit-unit administratif yang

yang lebih rendah, akan dapat meningkatkan pemahaman dan sensitivitas (daya tanggap) mereka terhadap masalah dan kebutuhan setempat, karena mereka akan bekerja pada tingkat di mana semua permasalahan tersebut terasa paling menekan dan terlihat paling jelas. Sedangkan bila dilihat dari sisi hubungan kerja desentralisasi ini akan dapat lebih mendekatkan, mengakrabkan, dan mengeratkan antara penduduk dengan para pejabat, staf pelaksana dan hal ini memungkinkan mereka mendapatkan informasi yang lebih baik yang diperlukan dalam proses perumusan rencana pembangunan daripada apa yang dapat mereka peroleh jika hanya menunggu di kantor pusat saja.

Desentralisasi ini dapat pula meningkatkan dukungan politis dan administratif bagi kebijaksanaan pembangunan nasional pada tingkat lokal, dalam mana rencana-rencana pembangunan tingkat nasional acap kali tidak diketahui oleh penduduk setempat. Dengan diketahui rencana-rencana pembangunan tingkat nasional pada tingkat lokal, maka disamping akan mendapat dukungan politis dan administratif pada tingkat lokal, juga dapat mendorong kelompok-kelompok sosial setempat untuk dapat meningkatkan kemampuan partisipasinya dalam merencanakan dan mengambil keputusan. Yang lebih penting lagi, desentralisasi ini juga dianggap dapat meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, dengan cara mengurangi beban kerja dan fungsi-fungsi manual yang dapat secara efektif diselesaikan oleh staf pelaksana lapangan atau para pimpinan unit administratif yang lebih rendah.

Dengan demikian pemerintahan yang dekat dengan yang diperintah (desentralisasi) akan mampu menyediakan layanan masyarakat lokal secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki *outputs* dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif. Desentralisasi dapat pula meningkatkan akuntabilitas, kecakapan berpolitik, dan integrasi nasional yang kesemuanya akan mendekatkan pemerintahan kepada rakyat dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada rakyat.¹⁰ Di samping itu, desentralisasi dapat pula melatih rakyat untuk terlibat dalam proses politik baik pada skala lokal maupun nasional.

Konsekuensi logis dari kebijakan desentralisasi adalah dibentuk daerah otonom. *Daerah otonom* adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

¹⁰ Joko Widodo, *op. cit.* hal 4.

undangan yang disebut dengan otonomi daerah. Daerah otonom berarti daerah yang memiliki *otonomi daerah*.

Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan dengan pemberian otonomi (hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada) kepada daerah otonom. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan didaerahnya. Kreativitas, inovasi, dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat. Dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain, penyediaan barang-barang publik dan pelayanan publik lebih terjamin.

Untuk memberikan alasan yang paling tepat dalam penentuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kebanyakan peneliti sepakat bahwa salah satu tujuan utama dianutnya pemberian otonomi daerah adalah agar kebijakan

pemerintahan lebih sesuai dengan kondisi wilayah dan masyarakat setempat. Motivasinya adalah, *pertama*, karena kebhinnekaan dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, pengakuan dan penghormatan atas sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, berbangsa, dan bernegara. *Ketiga*, pendayagunaan pengelolaan potensi daerah. *Keempat*, mendidik dan memberdayakan masyarakat dalam segala segi kehidupan. *Kelima*, pemerataan kemampuan sdaerah dengan memperhatikan kondisi setiap daerah yang berbeda-beda, tetapi tetap merupakan satu kesatuan berwawasan nusantara. ¹¹

Implementasi otonomi daerah harus lebih berorientasi pada pemberdayaan daerah, bila dilihat dari konteks kewilayahan (territorial), sedangkan bila dilihat dari struktur (tata) pemerintahan, berupa pemberdayaan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimilikinya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kesatuan bangsa dan negara. Kemudian dalam konteks kemasyarakatan, pemberdayaan yang diupayakan harus lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat di masing-masing daerah, sehingga mereka lebih berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya di daerahnya sendiri, sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing.

Mengacu pada pandangan Mustopadidjaja (1999) dalam tulisannya *Format Bernegara menuju Masyarakat Madani* yang dikutip oleh Riyadi dan Bratakusumah dalam *Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi mengenali*

¹¹ S.H. Sarundajang, op.cit. hal 73-74.

setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan peran pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam memikul tanggung jawab pembangunan. Dikemukakannya bahwa peran pemerintah dapat ditingkatkan antara lain melalui: a). Pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat; b). perluasan akses pelayanan untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat; c). pengembangan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan segala sumberdaya produktif yang tersedia, sehingga memiliki nilai tambah, guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dari pandangan tersebut sangat jelas bahwa peningkatan peran pemerintah bukan diupayakan pada penguatan pemerintah secara sentralistis, melainkan dengan cara memberikan peranan yang lebih besar kepada daerah dan masyarakat melalui strategi dan pola terarah dari konsep desentralisasi. Suatu pola elegan (indah/ideal) dengan filosofi "*tut wuri handayani*" (mengikuti dan menguatkan dari belakang) atau dalam istilah Gaebler dan Osborne disebut dengan *steering rather than rowing* (besifat mengarahkan ketimbang melaksanakan sendiri).

Dengan demikian setidaknya ada tiga paradigma pemberdayaan yang perlu disepakati oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, yaitu; pertama, pemberdayaan dalam konteks teritorial (kewilayahan); kedua, pemberdayaan dalam konteks struktur (tata

pemerintahan; ketiga, pemberdayaan dalam konteks kemasyarakatan. Kesemuanya ini harus dilaksanakan dalam proses dan pola yang berurutan, saling terkait, sehingga merupakan mata rantai yang tidak terputus, berdasarkan paradigma pemberdayaan bukan pemanfaatan.

Arti otonomi yaitu bahwa otonomi, melalui desentralisasi bukan diberikan kepada pemerintah daerah, bukan kepada DPRD, bukan kepada daerah, tetapi kepada masyarakat daerah. Hal ini merupakan esensi dari otonomi. Moh. Hatta mengatakan bahwa otomisasi suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang berada di dalam territorial tertentu yang semula tidak mempunyai otonomi menjadi memiliki otonomi. Masyarakat ini kemudian menjelma menjadi daerah otonom. Tujuan dari pemberian otonomi itu adalah ; (1) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; (2) pengembangan kehidupan demokrasi; (3) distribusi pelayanan publik yang semakin baik, merata dan adil; (4) penghormatan terhadap budaya lokal; (5) perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah.¹⁴

Dari berbagai pendapat yang mendukung dilaksanakannya desentralisasi dengan memberikan otonomi kepada daerah, dapat disimpulkan bahwa motivasi dan urgensi pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut : *pertama*, upaya peningkatan efisiensi dari efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, upaya melancarkan pelaksanaan pembangunan. *Ketiga*, meningkatkan peran

.....

¹² Bhenyamin Hoessein dalam S.H. Sarundajang, op. cit hal 80-81

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif (meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan) dari suatu keadaan yang ada di wilayah terkait. Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Namun begitu tidak berarti hal itu akan menjadi suatu hambatan yang tidak dapat dilampaui, melainkan justru menjadi tantangan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah jika pemerintah daerah mampu mengatasinya.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa dilakukan secara individual, melainkan harus dilaksanakan secara tim, baik dalam arti kerjasama tim antar anggota penyelenggara pemerintahan (aparatur pemerintah daerah) maupun kerjasama dalam arti institusional (antara Pemda dan DPRD). Di samping itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak secara interdisipliner sehingga mampu melakukan pengkajian dan analisis yang akurat dalam rangka perumusan hasil perencanaannya. Pihak-pihak di sini bisa dari masyarakat umum, kalangan akademisi, tokoh-tokoh ormas, parpol dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang dapat memberikan informasi penting tentang kebutuhan daerah dalam penyelenggaraannya ke depan. Untuk itulah, pemerintah daerah selaku institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan harus benar-benar

mengakomodir berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat dengan melibatkan hal-hal tersebut.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan sangat mendorong terciptanya suatu tata pemerintahan yang baik, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pemerintahan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya. Di samping itu, dengan melibatkan mereka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan menguntungkan dalam penyelenggaraannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam melihat prospek penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian agar penyelenggaraan pemerintahan dapat menghasilkan pemerintahan yang baik dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mustopadidjaja (1999), dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, ada tujuh prinsip yang perlu dikembangkan dan diimplementasikan dengan segala konsekuensinya dan implikasinya, yaitu:

- Demokrasi dan pemberdayaan
- Pelayanan
- Transparansi dan akuntabilitas
- Partisipasi

- Kemitraan
- Desentralisasi
- Konsistensi kebijakan dan kepastian hukum.

Ketujuh prinsip tersebut saling mempengaruhi dan saling melengkapi dan penerapannya harus dilakukan secara bersamaan dengan sinergi yang tinggi.

Implementasi good governance dalam kerangka desentralisasi diharapkan dapat membantu antara lain: 1). Peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah daerah; 2). Terbentuknya kebijakan-kebijakan publik yang mendukung peningkatan daya saing dan produktifitas daerah; 3). Terciptanya manajemen daerah yang sungguh-sungguh mencerminkan pengembangan aspirasi, potensi dan peluang pembangunan daerah.

Milikilah maka akan ada kehilangan.

Cobalah maka akan ada kegagalan.

Bergumullah maka akan ada kekalahan.

Untuk tiba, bebaskanlah.

Untuk menemukan, berserahlah.

Untuk mempercayai kosongkanlah.

Untuk menerima hormatilah.

Yang tampak rumit itu sederhana dan mudah diikuti sebab itu

bukan diberikan dari luar melainkan

menjadi dari dalam.

(Lao Tzu)

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI

Gambaran umum lokasi penelitian akan menjelaskan secara garis besar tentang bagaimana keadaan lokasi tempat penulis melakukan penelitian. Pada Bab ini berisi tentang sejarah terbentuknya wilayah administrasi lokasi penelitian, letak geografis, kependudukan, hingga pada pemerintahannya. Informasi ini penting untuk mengetahui bagaimana keadaan fisik dan sosial budaya kemasyarakatan dari lokasi tempat penelitian diadakan.

3.1. Sejarah

Kemutar Telu merupakan tiga kerajaan yang bernaung di bawah Kerajaan Sumbawa, yang meliputi Kerajaan Taliwang, Seran (Seteluk sekarang), dan Jereweh. Kemutar Telu yang berada di wilayah barat kabupaten Sumbawa itu muncul saat ekspansi Kerajaan Bali Karangasem ke Kerajaan Selaparang (Lombok) tahun 1641. Selaparang pada masa lalu merupakan salah satu di antara kerajaan-kerajaan yang bernaung di bawah kekuasaan kerajaan Sumbawa.


Oleh A. Ligtoet di dalam bukunya dinyatakan bahwa kerajaan Sumbawa, dalam bahasa daerahnya *Samawa*, adalah terdiri dari kerajaan itu sendiri dan ketiga daerah taklukannya (*de drie Vasalstaten*) yaitu; 1. Taliwang, 2. Seran (yang menduduki tempat yang terpenting dan acapkali disebut juga Seteluk) dan

ke-3 Jereweh. Dengan memiliki kedudukan yang sederajat ketiga daerah vassal ini terkenal dengan nama Kamutar Empat (de drie kamutar-landen).

Sebelum pencaplokan atas pulau Selaparang atau Lombok oleh orang-orang Bali, maka pulau ini juga merupakan daerah vassal dari Sumbawa sehingga orang menyebut dengan Kamutar Empat (de vier kamutar-landen). Keempat-empat daerah kamutar di atas langsung diperintah oleh rajanya masing-masing. Bagaimana perubahan ini terjadi, terdapat / tertulis di dalam "Buk" Dea Kalibelah Mandasingi, yang juga dikutip oleh Gezagheber van der Wolk dan memuat di dalam Memorie van Overgave-nya, peristiwa tersebut dapat dilihat pada kolom Ekspansi Orang-orang Bali ke Selaparang.

Konsep Kemutar Telu kembali mengangkat ke permukaan di kala perjalanan wacana pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat mengangkat ke permukaan. Memuncaknya keinginan kembali pada tatanan history Kemutar Telu dipicu oleh oleh peristiwa Kongres Rakyat Sumbawa Barat di Lapangan Sepak bola Kecamatan Alas, 11 Maret 2001. Kongres Rakyat Sumbawa Barat di Alas setidaknya membuat penggagas awal pembentukan Sumbawa Barat berdebar-debar, pasalnya silang pendapat tentang letak lokasi Ibu Kota Kabupaten merupakan isu utama memori Kemutar Telu menguak kembali.

Sebelumnya arah perjuangan pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, masih meliputi wilayah Utan / Rhee, Alas, Alas Barat, Seteluk, Taliwang, Brang Rea, Jereweh dan Sekongkang. Dengan total luas wilayah 266.419 km², seperti



yang diungkapkan oleh M. Jafar Yusuf dalam tulisan di harian Sumbawa Express, Sabtu, 1 April 2000. Pendekatan geobudaya Kemutar Telu (de drie Vazalstaten) / kerajaan tiga merupakan akumulasi dari berlarut-larutnya wacana pembentukan Sumbawa Barat yang tidak tuntas-tuntas. Rasa pesimisme juga muncul dari berbagai kalangan bahwa pendekatan geobudaya Kemutar Telu tidak cocok settingnya pada saat ini, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang putera kerajaan Sumbawa, Daeng Ewang dalam harian Kompas, Sabtu 1 Juni 2002, menyatakan agar berhati-hati mengapresiasi sejarah, termasuk Kemutar Telu sebagai bagian dari sejarah. Malah secara historis Kemutar Telu terjadi jauh sebelum Gunung Tambora meletus, 11-14 April 1815. "Kemutar Telu cocok pada zamannya. Tetapi setting, orientasi dan realitas masyarakat sekarang amat berbeda," ujar Daeng yang juga Ketua Lembaga Adat Samawa.

Masyarakat Sumbawa Barat agaknya paham betul bahwa pranata adat dan sosial semasa Kemutar Telu mustahil diterapkan pada era globalisasi di segala bidang, di mana batas antarnegara nyaris kian kabur oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kendati demikian, dalam batas tertentu aturan-aturan semasa kesultanan itu bisa saja 'hidup berdampingan' dengan situasi kekinian. Katakanlah 'Delapan Kewajiban' atau '*Sonap Lawang Blau Balu*' (melalui pintu delapan)-wujud Kemutar Telu bernaung di bawah kekuasaan Kerajaan Sumbawa. Satu di antaranya adalah membuat atau mengerjakan bendungan dan selokan bersama raja, dari (Desa) Mata hingga (Desa) Sekongkang. Desa Mata

merupakan wilayah selatan Kecamatan Empang, atau Timur Sumbawa Besar, dan Desa Sekongkang berada di barat Sumbawa Besar yang merupakan daerah lingkaran tambang eksplorasi emas dan tembaga PT. NNT.

Hal itu mengindikasikan susah-senang, berat-ringan suatu pekerjaan, termasuk produksi sumber daya alam jadi milik bersama. Itu dipertegas lagi dalam ujaran, *tumpun aeng-aeng tu tumpun nan tubaeng*. Artinya orang yang menjumpainya, ialah yang memiliki. Ungkapan itu menunjuk pada pemilikan tanah, tempat atau lokasi tempat tinggal. Lahan temuan untuk bertani, berkebun dan berladang itu biasanya ditandai dengan menanam pohon, atau menggantung batu asah, guna menghindari klaim orang lain atas tanah itu. "Sedang luas-sempitnya dan besar-kecilnya penguasaan tanah adalah sedalam cangkul masuk ke tanah, dan sisanya menjadi kepunyaan bersama (hak ulayat)," ujar Daeng. Semua itu menunjukkan keterbukaan etnis *Samawa*-sikap kodrati yang dimiliki hampir semua etnis di Nusantara ini. Dan dalam pergaulan sosial, manusia bukan dipandang dari latar belakang asal dan keturunan, melainkan bagaimana ia dapat membawa ketenangan dan harmoni dalam kehidupan bersama.

Hal senada dikatakan Syaifuddin Iskandar, Rektor Universitas Samawa di hari-hari yang sama. Katanya, janganlah membangkitkan romantisme masa lalu sebagai pembenaran aktivitas politis. Biarlah masa lalu itu bagian dari sejarah. Kita pahami sejarah itu untuk membangun Kabupaten Sumbawa ke depan. Orientasi yang dikembangkan mestinya, siapa saja yang lahir, dan berdomisili di

Sumbawa adalah etnis Samawa, kemudian menghormati tatanan adat dan budaya Samawa dalam kehidupan komunal. "Pemekaran wilayah pada dasarnya berpisah secara administratif demi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Meski berpisah secara teritorial, tetapi kami tetap satu etnis, etnis Samawa," kata Syaifuddin. Isu geobudaya mungkin sebatas reaksi sesaat segelintir kalangan yang tidak puas oleh perilaku penentu kebijakan, ketidak-mampuan elite birokrasi mengartikulasikan suara hati masyarakat akar rumput.

Meski di era reformasi sekarang keran kebebasan bicara dibuka lebar, namun praktik kolusi, korupsi dan nepotisme masih berpeluang terjadi. Kalau kemudian masyarakat Taliwang dan sekitarnya mendirikan Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, lalu elite pemerintahan membentuk komite yang sama, mungkin mereka curiga 'lembaga tandingan' itu diindikasikan salah satu bentuk KKN, dan tidak serius memperhatikan aspirasi mereka. Bagaimana mendorong penentu kebijakan lebih responsif dan peka terhadap suara hati mereka, itulah kira-kira latar belakang isu gayung geobudaya itu dilemparkan. Bagaimanapun juga berbagai silang pendapat tentang konsep kekinian yang mengedepankan inklusivitas (keterbukaan) dan tatanan Kemutar Telu yang berkaca pada History ternyata telah membuahkan hasil dengan resminya terbentuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan dibentuk berdasarkan Undang-undangan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, yang peresmiannya ditandatangani oleh

Mendagri Hari Subarno atas nama pemerintah RI di Jakarta tanggal 7 Januari 2004.

Dukungan terhadap konsep Kemutar Telu juga dilontarkan oleh DR Mahsun, Dosen FKIP Unram, dalam harian Kompas Sabtu 1 Juni 2002. Memang secara linguistik etnis Samawa memiliki dialek yang berbeda. bahasa Samawa terdiri atas Dialek Jereweh dengan penutur di wilayah Jereweh. Kemudian dialek Taliwang yang penuturnya di wilayah Taliwang dan Brang Rea. Lantas Dialek Tongo dipakai di wilayah pegunungan seperti Tongo, Tatar, Sejong, Nangkalanung, dan sebagian daerah Lunyuk. Sedang Dialek Sumbawa Besar digunakan sebagian besar penduduk kabupaten itu. Tidak dipungkiri penduduk Sumbawa Besar tidak mengerti bahasa warga Taliwang atau orang Tongo, meski penduduk Taliwang dan Tongo mengerti bahasa penduduk Sumbawa Besar. Lantaran pertimbangan penuturnya dominan, maka dialek Sumbawa Besar dijadikan 'bahasa persatuan', bahasa Samawa.

3.2. Letak Geografis

3.2.1. Letak dan Keadaan Alam

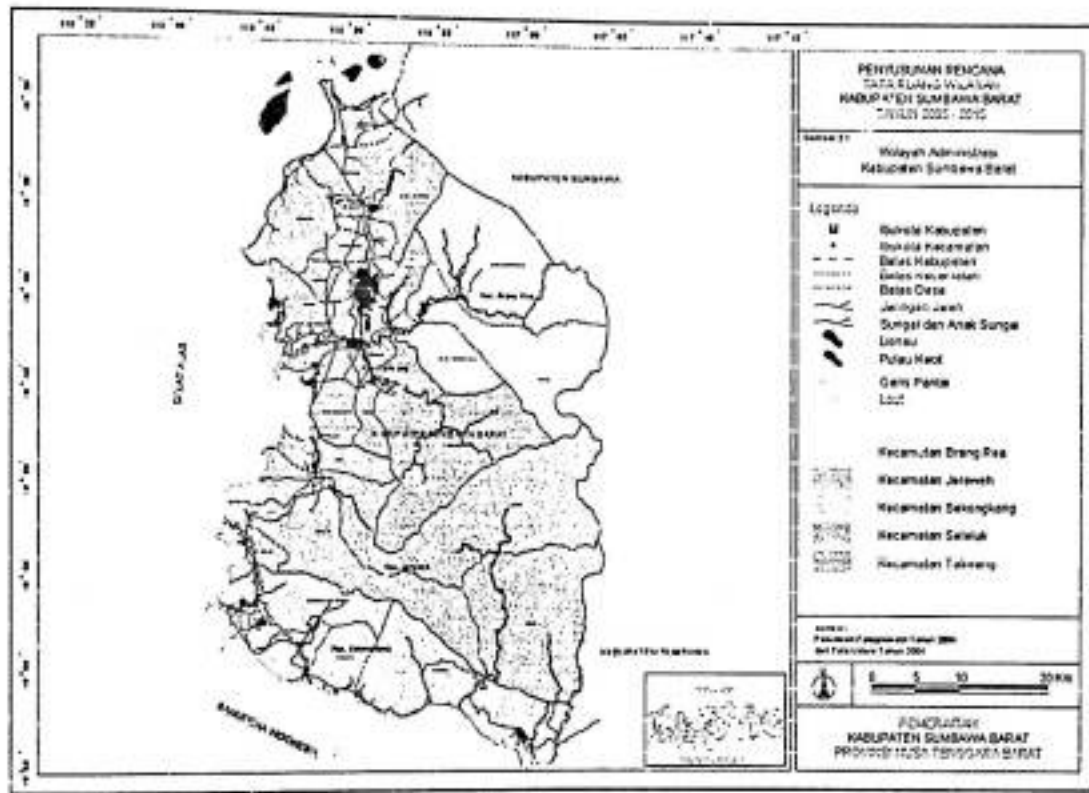
Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) adalah kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Wilayah daratan Kabupaten Sumbawa Barat seluas 1.849,02 km² (12 % dari luas pulau Sumbawa), yang mencakup 5 buah kecamatan

dengan urutan dari yang terluas hingga tersempit adalah : Kecamatan Jereweh 57.467ha atau 31,08 %, Kecamatan Taliwang 51.632 ha atau 27,93 %, Kecamatan Sekongkang 30.513ha atau 16,50 %, Kecamatan Seteluk 24.032 ha atau 13,00 %, dan Kecamatan Brang Rea 21.258 ha atau 11,50 % dari luas kabupaten.

Sementara itu, geografi kabupaten yang dikenal dengan motto *Pariri Lema Bariri* ini berada di ujung barat pulau Sumbawa, pada posisi 116° 42' sampai dengan 118° 22' Bujur Timur dan 8° 8' sampai dengan 9° 9' Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Alas Barat, Batulanteh, dan Lunyuk Kabupaten Sumbawa
- Sebelah Barat : Selat Alas
- Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Gambar 3.2.1.1
Peta Wilayah
Kabupaten Sumbawa Barat



Sumber: Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2006

3.2.2. Topografi Wilayah

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Sumbawa Barat cukup beragam, mulai dari datar, bergelombang, curam sampai sangat curam dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 mdpl, meliputi: datar seluas 21.822 hektar (11,80 %), bergelombang seluas 16.396 hektar (8,85 %) curam seluas 53.609 hektar (28,999 %), dan sangat curam seluas 93.102 hektar (50,35 %). Ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat berkisar antara 10 sampai dengan 650 mdpl. Topografi yang semakin datar sebagian

besar digunakan untuk kegiatan pertanian dan lokasi pemukiman, sedang topografi yang semakin curam hingga sangat curam merupakan kawasan hutan yang berfungsi untuk melindungi kawasan sekitarnya yang lebih rendah.

3.2.3. Luas dan Sebaran Lahan

Luas tanah/lahan di Kabupaten Sumbawa Barat adalah 148.902 hektar, hampir semuanya merupakan lahan kering dengan berbagai jenis pemanfaatan (seluas 174.571 hektar atau 94,41 %), lahan sawah seluas 8.822 hektar (4,77 %), sedangkan lahan dengan penggunaan lainnya seluas 1.509 hektar (0,82 %). Lahan kering di Kabupaten Sumbawa Barat hampir semuanya merupakan lahan/kawasan hutan seluas 140.023 hektar (75,73 % dari luas Kabupaten Sumbawa Barat). Lahan hutan tersebut sebagian besar masih berupa hutan lindung dan hutan produksi terbatas (sekitar 87,14 %), sedangkan sisanya (12,86 %) berupa hutan produksi tetap, cagar alam dan hutan wisata.

Lahan kering yang digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian dalam arti luas (selain hutan) berupa tegalan/kebun, lading/huma, lahan pengembalaan/padang rumput dan lahan perkebunan dengan total luas 15.171 hektar (8,20 % dari luas Kabupaten Sumbawa Barat), sedang lahan kering dengan penggunaan lain-lain dan sementara tidak diusahakan seluas 19.377 hektar (10,48 % dari luas Kabupaten Sumbawa Barat). Lahan kering untuk budidaya pertanian belum dimanfaatkan secara intensif untuk pengusaha

berbagai jenis tanaman, sedang pemeliharaan ternak umumnya dilakukan secara ekstensif. Lahan sawah, baik irigasi maupun sawah tadah hujan umumnya dimanfaatkan untuk kegiatan usaha tani dan palawija (terutama kedelai).

Lahan Kabupaten Sumbawa Barat yang digunakan sebagai lokasi obyek Wisata Alam, dalam empat tahun terakhir berkembang cukup pesat seiring dengan beroperasinya pertambangan emas PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) di wilayah tersebut. Jumlah lokasi obyek wisata alam yang potensial di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 10 lokasi, terdiri atas 7 obyek wisata pantai dan 3 obyek wisata alam darat dan air. Obyek wisata alam pantai yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara dan domestik di antaranya: Pantai Pasir Putih Poto Tano, Seteluk dan pulau-pulau di sekitarnya; Pantai Poto Batu dan Balat, Taliwang; pantai Maluku, Jereweh; dan pantai Sekongkang. Sementara itu, obyek wisata alam darat dan air yang banyak dikunjungi dan sekaligus memberikan manfaat ekonomi adalah danau/Lebo', Taliwang yang menghasilkan aneka jenis ikan air tawar.

3.2.4. Iklim dan Curah Hujan

Perairan laut di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang utama adalah Selat Alas dengan beberapa teluk kecil di sekitarnya seperti: teluk Taliwang, teluk Balat, teluk Maluku, teluk Lawar dan lain-lain. Perairan Selat Alas menghubungkan dua wilayah perairan yang mempunyai karakteristik yang berbeda, yaitu laut Flores di bagian utara dan Samudera Indonesia di bagian

selatan. Dengan demikian, selat Alas mempunyai arti penting karena peranannya dalam proses Arus Lintas Indonesia (ARLINDO), sehingga merupakan wilayah perairan dengan potensi perikanan yang cukup besar.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan wilayah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan berlangsung dari bulan November sampai Maret (5 bulan), sedang musim kemarau dari bulan April sampai bulan Oktober (7 bulan). Total hari hujan tahun 2004 sebanyak 95 hari dengan rata-rata perbulan 7,92 hari, sedang total curah hujan sebesar 2.156 mm atau rata-rata perbulan 179,66 mm. Dengan demikian, Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah kering, sehingga ketersediaan air merupakan faktor pembatas utama untuk pengembangan kegiatan ekonomi, terutama pertanian lahan kering.

3.2.5. Sektor-sektor Ekonomi

3.2.5.1. Pertanian dalam Arti Luas

Bidang **Pertanian**, jenis komoditi pertanian tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Sumbawa Barat adalah berupa tanaman pangan seperti : padi, palawija (umumnya kedelai dan kacang tanah), dan sayur-sayuran (pitsay/sawi, bawang merah, dan tomat) dengan frekuensi tanam 2 – 3 kali setahun. Sementara itu, komoditas pertanian tanaman pangan yang umumnya diusahakan di lahan kering di antaranya : jagung, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Luas panen dan produksi berbagai jenis tanaman

pangan di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2004 adalah : padi 13.946 ha dan 67.499 ton, kedelai 3.758 ha dan 5.164 ton, kacang tanah 756 ha dan 911 ton, jagung 1.110 ha dan 4.103 ton, kacang hijau 8.418 ha dan 2.839 ton, ubi kayu 99 ha dan 1.144 ton, ubi jalar 25 ha dan 282 ton, dan bawang merah 5 ha dan 37 ton.

Bidang **Kehutanan**, Kabupaten Sumbawa Barat termasuk kabupaten yang areal hutannya cukup luas. Berdasarkan luasnya, hutan di Kabupaten Sumbawa Barat menempati areal seluas 113.235 Ha yang terdiri dari hutan lindung 55.431,6 Ha, hutan suaka alam dan wisata 4.167 Ha, hutan produksi tetap 13.411 Ha, hutan produksi terbatas 14.188 Ha, hutan konversi 26.153 Ha, hutan bakau 3.136 Ha, hutan rakyat 1.000 Ha. Potensi sub sektor kehutanan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan adalah hutan rotan seluas 25.000 Ha, bambu duri untuk bahan kertas seluas 41.511 Ha, sengon alam/sengon bromo seluas 5.000 Ha, kayu gaharu seluas 1.000 Ha, dan tumbuhan liana/ akar-akaran.

Berdasarkan produksinya, hutan di Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari hasil kayu rimba campuran dan hasil hutan bukan kayu khususnya rotan. Hasil hutan kayu rimba campuran merupakan produksi kayu yang saat ini dikelola oleh KSU Somil Jaya yang mengelola kayu hasil land clearing PT. NNT yang pada tahun 2004 mencapai produksi 82.264,784 m³.

Sedangkan produksi hutan bukan kayu khusus rotan yang dikelola oleh UD. Pinayungan dengan produksi rotan pada tahun 2004 mencapai 1.756 ton.

Bidang **Perikanan**, produksi ikan di Kabupaten Sumbawa Barat sangat ditunjang oleh perairan lautnya yang luas. Semua kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat berpotensi untuk menghasilkan ikan laut, maupun usaha perikanan darat. Untuk usaha eksploitasi dan penangkapan di laut, beberapa komoditas andalan seperti ikan tongkol, cakalang, tenggiri, kakap, kerapu, lemuru dan kembung serta beberapa jenis ikan lainnya habitatnya ada di perairan pantai Pulau Sumbawa. Produksi ikan tongkol pada tahun terakhir adalah 213,5 ton, cakalang 4,5 ton, tenggiri 2,8 ton, kakap 21,5 ton, kerapu 3,0 ton, lemuru 296,7 ton dan kembung 43,7 ton.

Bidang **Peternakan**, Kabupaten Sumbawa Barat terkenal sebagai daerah penghasil ternak di Nusa Tenggara Barat. Produksi ternak banyak diekspor ke luar daerah seperti ke pulau Jawa. Populasi ternak di daerah ini cenderung berfluktuasi, hal ini mungkin disebabkan oleh adanya pengiriman ternak yang berlebihan atau adanya factor-faktor lain. Jenis ternak yang dikembangkan oleh masyarakat sampai saat ini adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam ras, dan itik. Potensi pengembangan ternak di Kabupaten Sumbawa Barat masih sangat besar dengan prospek cukup baik dimana ketersediaan padang penggembalaan dan pakan berupa

...baran padang rumput yang cukup besar dengan luas 55.479 Ha. yang tersebar di seluruh kecamatan.

Bidang **Perkebunan**, komoditas yang banyak diusahakan di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2004 adalah kelapa dengan produksi 537,93 ton, jambu mete dengan produksi 64,88 ton, kopi dengan produksi 231 ton, serta asam dengan produksi 115,50 ton. Sedangkan untuk komoditas lainnya seperti pinang, kapuk, kemiri, lada, tebu, tembakau rakyat, dan kakao juga telah di usahakan oleh masyarakat namun masih memiliki jumlah produksi yang relatif sedikit.

3.2.5.2. Pertambangan

Sektor pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat cukup memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi perdapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Potensi bahan tambang/galian golongan B dan C yang terdapat di dalam kawasan hutan Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2004 cukup banyak. Dua jenis bahan tambang golongan B yang mempunyai potensi cukup banyak adalah : emas 1.972 ton dan tembaga 4.200.000 ton. Aneka jenis bahan tambang dan galian lainnya tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat dengan total luas areal dan jumlah cadangan masing-masing di antaranya : aneka macam batu bangunan 40 ha dan 30.003.020 m³, aneka macam batu kapur 49,5 ha dan 11250.000 m³, sirtu 21,63 ha dan 259.500 m³, dan batu silika 70 m³.

Sementara itu, jenis bahan tambang /galian golongan C yang potensinya tidak tercatat antara lain: gypsum, posfat, kaolin dan tanah urug.

Bahan tambang/galian golongan B (terutama tembaga dan emas) yang berlokasi di Batu Hijau Kecamatan Jereweh – Sekongkang, sejak tahun 2000 telah mulai dieksploitasi oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) dengan menggunakan sarana prasarana dan teknologi yang sangat modern, sehingga kapasitas produksinya sangat tinggi. Demikian juga untuk eksploitasi bahan galian/tambang golongan C (terutama batu kapur) telah dilakukan oleh PT. Bumi Pasir Mandiri (PT. BPM) dengan menggunakan sarana prasarana dan teknologi yang modern. Keberadaan kedua perusahaan besar tersebut sejak tahap investasi sampai operasional saat ini telah memberikan banyak manfaat ekonomi dan kesempatan kerja bagi wilayah dan masyarakat, dengan tanpa mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkannya (terutama terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakat di sekitar lokasi penambangan). Sementara itu, usaha pertambangan rakyat dengan skala usaha yang relatif kecil dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang sederhana.

3.2.5.3. Industri dan Kerajinan

Di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat beberapa industri seperti olahan rotan (PT. Pinanjungan), industri marmer (PT. Kurnia Tambora), Industri Pengolahan Batu Kapur (PT. BPM), Genteng Press (PT. Abadi

Super), Industri Kayu (Somil Jaya). Sedangkan industri lainnya berupa industri kerajinan rotan seperti meubel kayu, meubel rotan, kerajinan kerang mutiara, tenun tradisional, anyaman bambu, tikar rotan, gula aren, kopi bubuk dan ukiran kayu.

3.2.6. Pulau-Pulau Kecil

Pulau-pulau kecil adalah pulau-pulau yang berukuran kecil yang secara ekologis terpisah dari pulau induknya. Pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah 14 pulau dengan luas mencapai 828,3 ha. Pulau-pulau kecil tersebut tidak mempunyai penghuni tetap, tetapi sebagian dari pulau-pulau tersebut (6 pulau atau 42,86 %) telah dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat untuk berbagai macam kegiatan seperti: tempat budidaya mutiara, budidaya rumput laut, penangkapan ikan, tempat pengambilan sarang burung walet, dan tempat pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu.

3.3. Kependudukan

3.3.1. Penduduk

Salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan adalah jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk yang besar tentu saja akan menjadi modal utama bilamana dilengkapi dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai serta berada dalam usia produktif. Sebaliknya bila tidak dilengkapi dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai justru akan menjadi

beban berat bagi pemerintah. Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2004 mencapai angka 92.405 jiwa yang terdiri dari 47.344 laki-laki dan 45.061 perempuan. Untuk lebih jelas jumlah penduduk dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.3.1.1
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Kecamatan	Penduduk		Jumlah (Jiwa)	Luas (Km ²)	Kepadatan Jiwa/Km ²
		Laki-laki	Perempuan			
1.	Taliwang	19.134	18.276	37.410	516,83	72
2.	Seteluk	11.369	11.724	23.093	240,32	96
3.	Jereweh	6.952	6.169	13.121	574,67	23
4.	Brang Rea	5.365	5.016	10.381	212,07	49
5.	Sekongkang	4.524	3.876	8.400	305,13	28
		47.344	45.061	92.405	1.849,02	50

Sumber: Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2006

Berdasarkan tabel di atas, bila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.849,02 Km², maka setiap km² dihuni oleh 50 jiwa, ini memperlihatkan penduduk Sumbawa Barat masih jarang. Dilihat keadaan masing-masing kecamatan, maka kecamatan Seteluk merupakan yang terpadat yaitu sebesar 96 jiwa per km², diikuti kecamatan Taliwang yaitu sebesar 72 jiwa per km². Untuk kecamatan lainnya rata-rata memiliki tingkat kepadatan di bawah 50 jiwa per km², dimana kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Jereweh yang hanya memiliki kepadatan penduduk sebesar 23 jiwa per km². Tingkat kepadatan penduduk tersebut tergolong "sangat jarang", namun penyebaran penduduk antar kecamatan dan desa

“relatif tidak merata”, diman desa-desa di kecamatan Seteluk dan Taliwang lebih padat dari desa-desa di kecamatan Brang Rea, Jereweh, dan Sekongkang. Jarangnya penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat lebih lanjut merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan suatu daerah menjadi daerah tujuan transmigrasi. Sejak tahun 1997 Kabupaten Sumbawa Barat telah ditetapkan sebagai daerah tujuan transmigrasi, dengan transmigran yang berasal dari daerah yang padat penduduk seperti Jawa, Bali, Lombok dan daerah-daerah lainnya.

Penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat mengalami perkembangan rata-rata 2,41 % per tahun, yaitu dari 86.103 jiwa pada tahun 2001 menjadi 92.405 jiwa pada tahun 2004. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penduduk yang lahir dan mati, serta penduduk yang datang dan pindah ke dari kabupaten tersebut. Pada tahun 2004, jumlah penduduk yang lahir 1.185 jiwa dan mati 147 jiwa (selisih 1.038 jiwa) sedangkan jumlah penduduk yang datang 723 jiwa dan pindah 559 jiwa (selisih 164 jiwa). Jumlah penduduk yang datang ke Kabupaten Sumbawa Barat pada waktu mendatang diperkirakan akan semakin banyak seiring dengan semakin banyaknya investasi dan operasional kegiatan pembangunan di daerah tersebut.

Jumlah rumah tangga penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2004 sebanyak 22.353 rumah tangga dengan jumlah angkatan kerja

sebanyak 36.925 jiwa. Angkatan kerja tersebut sebagian besar (67,40 %) mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan utama di sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan). Hal tersebut terkait erat dengan sebagian besar potensi sumberdaya yang saat ini mampu direalisasikan di wilayah tersebut, yaitu sumberdaya alam yang berupa lahan pertanian dan perairan dalam menopang kehidupan penduduknya. Sementara itu, sebagian kecil rumah tangga penduduk mempunyai pekerjaan di sektor non pertanian (32,60 %) seperti: industri, perdagangan, pengangkutan, pegawai negeri dan jasa-jasa lainnya. Jumlah angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian akan dapat dikurangi apabila pengembangan sumber daya di sektor ekonomi lainnya dapat dilakukan dengan baik dan terarah.

3.3.2. Tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja atau penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2004 adalah sebesar 62.918 jiwa. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut kelompok umur disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat
Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	5.196	4.935	10.131
5-9	4.853	4.639	9.492
6-14	5.034	4.831	9.865
15-19	4.052	3.866	7.918
20-24	4.716	4.448	9.164
25-29	4.869	4.601	9.470
30-34	3.997	3.781	7.778
35-39	3.422	3.251	6.673
40-44	2.769	2.665	5.461
45-49	2.271	2.162	4.433
50-54	1.854	1.768	3.622
55-59	1.200	1.149	2.349
60-64	1.156	1.110	2.266
65-69	752	720	1.472
70-75	622	598	1.220
> 75	554	537	1.091
	47.344	45.061	92.405

Sumber: Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2006

Berdasarkan struktur umur penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2004, jumlah penduduk yang tergolong usia produktif (15 – 64 tahun) sebanyak 59.134 orang (63,99 %), sedangkan penduduk berusia belum produktif (0 – 14 tahun) sebanyak 29.488 orang (31,91 %) dan penduduk berusia tidak produktif (65 tahun ke atas) sebanyak 3.783 orang (4,09 %).

3.3.3. Keagamaan

Penduduk menurut agama di Kabupaten Sumbawa Barat mayoritas terdiri dari agama Islam yaitu sebanyak 90.281 jiwa atau sekitar 99,86 % dari

jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk menurut agama perkecamatan dirinci dalam table berikut:

Tabel 3.3.3.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat
Berdasarkan Agama

Kecamatan	Islam	Khatolik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
Sekongkang	7.984	154	165	89	1	7	8.400
Jereweh	12.469	240	256	142	3	11	13.121
Taliwang	37.364	30	2	10	-	4	37.410
Brang Rea	10.369	8	1	2	-	1	10.381
Seteluk	22.902	7	8	983	-	-	23.093
Jumlah	90.281	439	432	1.226	4	23	92.405

Sumber: Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2006

3.3.4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu program yang sedang digalakkan pemerintah. Untuk itu sarana dan prasarana pendidikan harus terus ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun mutunya. Penduduk usia sekolah diharapkan bisa tertampung seluruhnya pada sekolah yang telah ada. Berikut tabel jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat:

Tabel 3.3.4.1
Jumlah Sarana Pendidikan
Di Kabupaten Sumbawa Barat

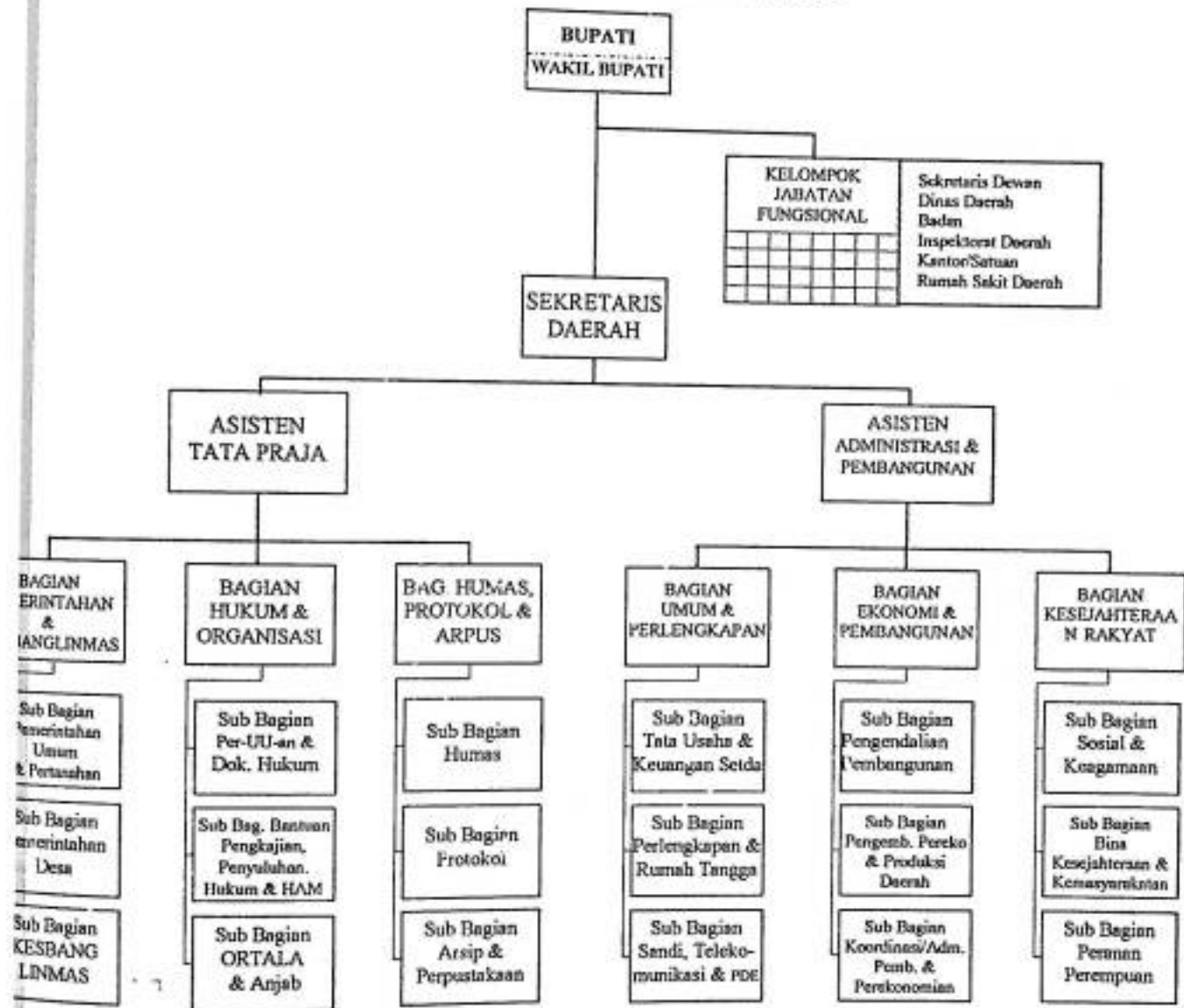
No.	Tingkat Pendidikan	Sarana Pendidikan			
		Murid	Guru	Sekolah	Gedung
1.	TK	138	84	42	30
2.	SD	11.943	847	85	80
3.	SLTP	4.445	149	23	22
4.	SMU	2.434	74	9	7
5.	Perguruan Tinggi	190	60	1	1
		19.150	1.214	160	140

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2006

3.4. Pemerintahan

Menindaklanjuti terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat di penghujung tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003, maka Penjabat Bupati Sumbawa Barat mengeluarkan Keputusan Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan keputusan tersebut, di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat 25 Lembaga Pemerintah yang terdiri atas : Sekretariat 2 organisasi (Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan), Dinas 11 organisasi, Badan 4 organisasi, Kantor 5 organisasi, serta RSUD, Kecamatan, dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) masing-masing 1 organisasi. Selain itu terdapat DPRD dan KPUD masing-masing 1 organisasi. Berikut struktur organisasi pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat:

Gambar 3.4.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT



Kabupaten Sumbawa Barat mencakup lima kecamatan dengan 37 desa yaitu: Kecamatan Seteluk 11 desa, Kecamatan Taliwang 11 desa, Kecamatan Brang Rea 4 desa, Kecamatan Jereweh 5 desa, dan Kecamatan Sekongkang 6 desa. Dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, pemerintah/aparat kecamatan

dan desa bekerjasama dengan BPD dan LKMD yang terdapat pada setiap desa. Jumlah aparat kecamatan dan desa cukup banyak dan dengan pengalaman kerja yang cukup lama, maka perannya dalam pembangunan wilayah pedesaan sudah terlihat, tetapi belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini ditunjukkan oleh terdapatnya variasi tingkat perkembangan desa meliputi: tingkat swadaya 6 desa, tingkat swakarya 12 desa, dan tingkat swasembada 19 desa.

Kabupaten Sumbawa Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2003 yang terdiri dari 5 kecamatan yang terbagi ke dalam 37 desa serta terbagi ke dalam 131 buah dusun/lingkungan. Desa-desa di Kabupaten Sumbawa Barat sudah mulai mengalami kemajuan, dimana desa yang termasuk klasifikasi swasembada berjumlah 24 desa, sisanya sebanyak 13 desa masih termasuk ke dalam klasifikasi desa swakarya. Sedangkan jika dirinci berdasarkan tipe desa maka desa dengan tipe persawahan memiliki jumlah terbanyak yaitu sebanyak 33 desa, diikuti oleh desa perikanan, desa perkebunan, desa peternakan dan desa pertambangan masing-masing 1 desa.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Kabupaten Sumbawa Barat adalah kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Menurut Undang-undang tersebut tujuan dibentuknya Kabupaten Sumbawa Barat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal tersebutlah yang kemudian dijadikan pertanyaan pada rumusan masalah, yaitu bagaimana potensi dan peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa Barat dalam menjalankan pemerintahannya. Di bawah ini akan dijelaskan secara terperinci antara lain :

4.1. Potensi Sumberdaya Alam di Kabupaten Sumbawa Barat

4.1.1. Pertambangan

Dilihat dari sebaran dan jumlah cadangan masing-masing bahan tambang di kecamatan, maka potensi bahan tambang di tiap-tiap kecamatan dapat dirinci sebagai berikut: marmer berpotensi di kecamatan Taliwang, Brang Rea, Jereweh, dan Sekongkang dengan jumlah cadangan mencapai $127.620.417 \text{ m}^3$; Batu Gamping berpotensi di kecamatan Taliwang, Jereweh, Sekongkang, dan Seteluk dengan jumlah cadangan mencapai $132.712.150 \text{ m}^3$; Kaolin berpotensi di kecamatan Taliwang, Jereweh, Sekongkang, dan Seteluk dengan jumlah cadangan mencapai $1.580.458 \text{ m}^3$; Lempung berpotensi di kecamatan Brang Rea dan Jereweh dengan jumlah cadangan mencapai $1.125.000 \text{ m}^3$; Batu Bangunan berpotensi di kecamatan Taliwang, Brang Rea,

Sekongkang, dan Seteluk dengan jumlah cadangan mencapai 40.030.728 m³ dan 6.250.000 m³ di Kec. Sekongkang ditambang untuk PT. NNT; Sirtu berpotensi di kecamatan Taliwang, Brang Rea, Jereweh, dan Sekongkang dengan jumlah cadangan mencapai 361.687 m³; Tanah Urug berpotensi di kecamatan Seteluk dengan jumlah cadangan mencapai 2.200.000 m³; Tembaga, Emas, dan Perak berpotensi di kecamatan Sekongkang, Jereweh, Taliwang, dan Brang Rea Belum diketahui jumlah cadangannya; Timbal dan Seng Taliwang dan Brang Rea Belum diketahui jumlah cadangannya

Sampai dengan tahun 2004 sektor ini merupakan penyumbang terbesar devisa bagi daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang mencapai 17,41 % pertahun dibandingkan sektor lainnya. Sebagai kontraktor bagi pemerintah Indonesia, PT. NNT memberikan kontribusi yang dukup besar bagi ekonomi bangsa ini melalui penciptaan lapangan kerja, pembayaran royalti dan pajak. Saat ini PT. NNT menyediakan lapangan kerja langsung bagi lebih dari 7.000 orang yang terdiri atas 4.200 karyawan PT. NNT dan 3000 karyawan kontraktor.

Melihat data di atas, tak salahlah bila pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk beberapa waktu ke depan mengandalkan sektor pertambangan sebagai sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut dapat dimaklumi karena potensi barang tambang yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat sangatlah besar dan PT. NNT telah mengontrak daerah tambang di kecamatan Sekongkang selama 40

tahun dengan royalti sebesar ± Rp. 40 milyar pertahunnya. Namun sebagai barang yang tidak dapat diperbaharui dan dapat habis sewaktu-waktu, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat haruslah tidak semata-mata mengandalkan sektor pertambangan semata untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat haruslah mempunyai sektor unggulan lain yang dapat diandalkan sepanjang masa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di masa yang akan datang.

4.1.2. Pertanian

Sektor pertanian memegang peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kabupaten Sumbawa Barat dengan lahan pertanian yang sangat luas memiliki potensi penting dalam menyumbang stok pangan nasional.

Padi sebagai sumber bahan makanan pokok masyarakat, maka komoditas ini menempati areal lahan terluas pengusahannya oleh masyarakat. Potensilahannya tersedia seluas 18.892 ha, sedangkan lahan yang dimanfaatkan untuk penanaman padi seluas 13.735 ha dengan produktivitas rata-rata sebesar 45,30 kw/ha.

Kedelai termasuk komoditas unggulan daerah yang dewasa ini semakin ditingkatkan daya dukungnya oleh pemerintah. Potensi lahan untuk pengembangan komoditas kedelai di Kabupaten Sumbawa Barat adalah seluas 5.917 ha, yang hingga saat ini baru dimanfaatkan seluas 3.758 ha dengan

produktivitas rata-rata 11,10 Kw/Ha. Dengan demikian peluang pengembangan komoditas ini masih sangat terbuka, terutama dengan masih tersedianya lahan yang dipandang sangat sesuai untuk tanaman kedelai yaitu sekitar 2.159 Ha.

Di Kabupaten Sumbawa Barat, produktivitas tanaman jagung rata-rata mencapai 23,88 Kw/Ha. Luas lahan yang tersedia untuk pengembangan komoditas ini adalah 6.034 Ha, namun baru termanfaatkan sekitar 1.930 Ha. Peluang untuk mengembangkan jagung ini sesungguhnya amat besar (potensi pengembangan seluas 4.110 Ha), karena kebiasaan petani pada umumnya selalu menanam jagung pada setiap musimnya baik di kebun, ladang maupun sawah. Pemanfaatan komoditas jagung oleh para petani di Kabupaten Sumbawa Barat hingga saat ini belum sampai pada taraf pengusahaan secara ekonomi /untuk dijual, melainkannya sebagai sambilan untuk mengisi lahan-lahan kosong di ladang maupun di kebun.

Lahan pertanian untuk pengembangan potensi kacang hijau mencapai 7.663 Ha, dan terbesar di seluruh kecamatan. Lahan yang termanfaatkan sampai saat ini adalah seluas 2.684 Ha, dengan produktivitas rata-rata mencapai 8,73 Kw/Ha. Potensi untuk pengembangan kacang tanah mencapai 2.974 Ha. Sedangkan luas tanah yang termanfaatkan hingga saat ini adalah 568 Ha, dengan rata-rata produktivitas 29,06 Kw/Ha.

Hortikultura, dilihat dari potensi lahan yang tersedia nampaknya di antara komoditas hortikultura yang paling memungkinkan dikembangkan dan

merupakan komoditas penunjang antara lain: jenis buah-buahan (jeruk siam, jeruk besar, mangga, nangka, papaya, sawo dan pisang), jenis buah-buahan (cabe, bawang merah, kabis, sawi, kacang panjang, tomat, terong, mentimun dan bayam). Areal pengembangan komoditas ini cukup luas, sementara lahan yang dimanfaatkan masih sebagian kecil sehingga peluang pengembangannya masih cukup besar. Disamping kegiatan budidaya, peluang investasi untuk komoditas ini cukup besar untuk pengembangan agro industri.

Jika ditinjau dari segi luas lahan menurut penggunaannya, dari 184.902 ha luas keseluruhan Kabupaten Sumbawa Barat dapat dirinci penggunaan lahan yaitu luas lahan sawah seluas 8.822 ha dan luas lahan bukan sawah seluas 176.080 ha. Dari 8.822 ha lahan sawah, terdapat 3.646 lahan yang menggunakan irigasi teknis dengan frekuensi 2 kali masa panen, 1.796 ha menggunakan irigasi $\frac{1}{2}$ teknis dengan frekuensi 2 kali masa panen dan 895 ha 1 kali masa panen, 706 ha menggunakan irigasi sederhana PU dengan frekuensi 404 ha 2 kali masa panen dan 302 1 kali masa panen, 787 ha menggunakan irigasi desa/non PU dengan frekuensi 205 ha 2 kali masa panen dan 582 ha 1 kali masa panen, dan selebihnya sawah tadah hujan dengan frekuensi 1 kali masa panen seluas 1.886 ha.

Lahan bukan sawah yang terdiri dari 176.080 ha, dibagi ke dalam dua kelompok. Lahan kering yang terdiri dari pekarangan 962 ha, tegal/kebun 7.520 ha, ladang/huma 3.510 ha, pengembalaan/padang rumput 3.061 ha, sementara tidak diusahakan 2.712 ha, hutan rakyat 1.656 ha, hutan Negara

138.367 ha, perkebunan 1.080 ha, lain-lain 15.739 ha. Lahan lainnya yang terdiri dari rawa-rawa tidak ditanami seluas 987 ha, tambak 502 ha, dan kolam/tebat/empang 20 ha.

Berdasarkan data potensi lahan pertanian di atas, kita dapat melihat bahwa lahan pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat berpotensi sangat besar untuk dikembangkan dan ditingkatkan produktivitasnya. Masih besarnya lahan yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga masih minimnya sarana dan prasarana pertanian membuat sektor tersebut belum maksimal dalam menyumbangkan APBD kepada daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat secara jeli telah melihat betapa potensi pada sektor pertanian ini dapat diandalkan pada masa-masa yang akan datang, dengan catatan digabungkan dengan sektor lain yang dapat meningkatkan hasil guna produk pertanian yang dihasilkan, misalnya dengan bidang industri. Tak salahlah jika penyelenggaraan pemerintahan ke depan di Kabupaten Sumbawa Barat menitikberatkan pada pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas. Hal ini terlihat jelas pada visi rencana pembangunan daerah tersebut untuk 10 tahun mendatang yaitu Kabupaten Sumbawa Barat Berkembang Melalui Pembangunan Agroindustri Andalan.

4.1.3: Kehutanan

Adanya pengetatan pemerintah di sub sektor kehutanan, menyebabkan produksi di sektor kehutanan terjadi penurunan. Beberapa hasil kehutanan

daerah Sumbawa Barat merupakan komoditi ekspor yang sangat laris, seperti hasil olahan kayu, rotan, madu dan lain-lain. Untuk melestarikan hutan di daerah ini pemerintah telah mengadakan penghijauan hutan dengan mengadakan penanaman kayu sebagai hutan tanaman industri. Beberapa jenis tanaman tersebut adalah johar, jati, mahoni, dan lain sebagainya.

Sektor kehutanan mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah terutama dalam menjaga kelestarian hutan. Hal tersebut dapat dilihat pada kebijakan Sejuta Pohon yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani pembabatan hutan yang marak terjadi di Indonesia pada umumnya. Kebijakan ini dikeluarkan dalam mendukung kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh warga Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung kebijakan tersebut yaitu dengan menanam 10 buah pohon jati. Kemudian kepala desa akan memberikan sertifikat Sejuta Pohon yang nantinya dapat digunakan untuk menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis. Kebijakan ini sekaligus dapat meningkatkan PAD Kabupaten Sumbawa Barat pada masa yang akan datang. Sebab menurut Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Zulkifli Muhadli, dengan jumlah penduduk saat ini yang kurang lebih 100 ribu jiwa maka 10 tahun yang akan datang Kabupaten Sumbawa Barat akan memperoleh pendapatan sebesar 1 triliun rupiah. Dengan perhitungan 100 ribu orang menanam 10 pohon, maka akan

diperoleh sebanyak 1 juta pohon. Jika harga 1 pohon adalah 1 juta maka total penghasilan daerah dari 1 juta pohon adalah 1 trilyun rupiah.

Kebijakan sejuta pohon ini merupakan salah satu kebijakan yang paling populer di Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan sebuah kebijakan tersebut penda Kabupaten Sumbawa Barat mendapat beberapa manfaat sekaligus yaitu kelestarian lingkungan dan juga peningkatan PAD pada masa yang akan datang, serta menumbuhkan kesadaran dan partisipasi dari masyarakat untuk turut serta membangun daerahnya.

4.1.4. Perikanan

Pengembangan usaha perikanan merupakan bidang usaha yang cenderung lebih diminati oleh para investor yang masuk ke Kabupaten Sumbawa Barat. Selain produksi perikanan laut yang lebih menggiurkan bagi para investor antara lain budidaya usaha tambak, rumput laut dan budidaya kerang mutiara.

Untuk pengembangan pertambakan masih tersedia lahan yang potensial seluas 3.136 Ha. Yang sudah masuk dalam rencana investasi baru belum ada, namun yang beroperasi seluas 8,5 Ha sedang sisanya 622 Ha, tidak beroperasi. Investasi bidang pertambakan sangatlah strategis untuk dikembangkan mengingat produksinya bernilai ekonomis tinggi serta berpotensi menyerap tenaga kerja yang relatif banyak.

Sesungguhnya berdasarkan kemampuan yang ada dan potensi pengembangannya, ke depan usaha pengembangan perikanan meliputi:

- 1). Perikanan air laut, terdiri dari perikanan pantai dan lepas pantai yang potensi pengembangannya di kecamatan Seteluk, Taliwang, Jereweh dan Sekongkang.
- 2). Perikanan Perairan Umum, terdiri dari ikan rawa Taliwang, sungai, dan laguna Bertong, yang dikembangkan di titik-titik tertentu pada beberapa sungai penting di Kabupaten Sumbawa Barat.
- 3). Perikanan air tawar, terdiri dari kolam dan kerambah yang potensial dikembangkan di kecamatan Brang Rea.
- 4). Perikanan air payau (tambak dan sejenisnya), digolongkan tambak Zona I dan tambak Zona II yang potensi pengembangannya di kecamatan Seteluk, Taliwang, Jereweh dan Sekongkang.

Budidaya kerang mutiara sangat potensial sekali untuk dikembangkan karena kondisi perairan pantai Kabupaten Sumbawa Barat sangat cocok untuk pengembangan komoditas ini. Pengusaha mutiara di Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari 4 pengusaha dengan 5 lokasi yaitu: Tanjung Bero Taliwang, Labuhan Balat Taliwang, Kecamatan Seteluk, Sepakek, dan Pulau Kalong.

Rumput laut adalah komoditas unggulan di sub sektor perikanan, di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat areal seluas 1.550 Ha yang potensial untuk dikembangkan. Budidaya rumput laut umumnya dilakukan oleh

masyarakat yang berdomisili di daerah pesisir pantai, kegiatan distribusi dan pemasaran rumput laut merupakan usaha yang mengiurkan.

Khususnya ikan kerapu selain penangkapan juga sudah mulai dibudidayakan, lokasi *pilot project* budidaya ikan kerapu yang telah dilaksanakan yaitu di desa Labuan Lalar kecamatan Taliwang, desa Labuan Poto Tano kecamatan Seteluk. Secara rinci potensi komoditas perikanan dapat disajikan sebagai berikut:

1). Potensi Luas Areal Penangkapan

Potensi areal penangkapan di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat 3 wilayah yaitu teluk Labuan Lalar seluas 175 Km², selat Alas seluas 330 Km² dan Samudra Indonesia seluas 655,17 Km².

2). Potensi Lestari Sumberdaya Ikan Laut

Potensi sumberdaya penangkapan ikan di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 20.573 ton pertahun, terdiri dari kelompok ikan pelangis sebanyak 15.150 ton dan ikan demersal sebanyak 5.423 ton. Secara rinci potensi sumberdaya penangkapan ikan di masing-masing wilayah perairan Kabupaten Sumbawa Barat adalah: teluk Labuan Lalar ikan pelangis sebanyak 2.285 ton dan ikan demersal sebanyak 818 ton, selat Alas ikan pelangis sebanyak 4.309 ton dan ikan demersal sebanyak 1.542 ton, samudra Indonesia ikan pelangis sebanyak 8.556 ton dan ikan demersal sebanyak 3.063 ton.

Jenis ikan yang potensial di daerah perairan Kabupaten Sumbawa Barat adalah tongkol, cakalang, tenggiri, ikan kue, kakap, kerapu, lemuru, ikan hiu, tembang, teri, selar, peperek, kembung, cumi-cumi, udang, layang dan lobster. Jenis ikan yang paling potensi untuk dikembangkan adalah ikan tongkol, ikan lemuru, tembang, kembung, dan layang. Sedangkan komoditas lain yang potensial untuk dikembangkan adalah rumput laut, teripang, kerang-kerangan, benur, nener, penyu, ikan hias, lobster dan kerang mutiara.

Secara rinci wilayah perairan dan usaha perikanan yang potensial adalah sebagai berikut :

- Selat Alas (termasuk perairan pulau Namo dan pulau Belang).

Jenis komoditi yang cukup potensial adalah kerang mutiara, cumi-cumi, cakalang, tongkol, teri, rumput laut, nener, benur, teripang, tuna dan ikan hias.

- Teluk Labuan Lalar (termasuk pulau Sesait dan pulau Dua)

Potensi yang diminati antara lain : kakap, bangbangan, tembang, peperek, lemuru, tongkol, cucut, cakalang, rumput laut, udang lobster, teripang, ikan hias, kerapu, kerang-kerangan (japing lolak dan patulaga).

3). Potensi Areal Budidaya Komoditi Perikanan

Potensi areal budidaya komoditi perikanan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat adalah budidaya rumput laut, tambak dan mutiara. Sedangkan untuk budidaya teripang dan ikan kerapu masih dalam upaya perintisan. Adapun potensi luas wilayah budidaya perikanan adalah budidaya rumput laut 1.550

Ha, budidaya tambak 2.136 Ha, budidaya mutiara 895 Ha, budidaya teripang 50 Ha, budidaya kerapu 1.106 Ha.

➤ Budidaya Rumpun Laut

Rumpun laut saat ini telah dikembangkan di beberapa perairan Kertasari, Poto Tano Kecamatan Seteluk, Jelenga kecamatan Jereweh. Sedangkan pengelola budidaya rumput laut masih dilakukan oleh petani dan kelompok tani secara swadaya, sedangkan untuk pemasaran hasil dikoordinasi oleh beberapa orang pengumpul lokal, sehingga peluang investor untuk menanamkan modal di bidang budidaya rumput laut di Kabupaten Sumbawa Barat masih terbuka lebar, mengingat potensi rumput laut Kabupaten Sumbawa Barat cukup besar. Produksi rumput laut di Kabupaten Sumbawa Barat adalah 138,2 ton, yang tersebar di beberapa kecamatan, dengan produksi tertinggi di kecamatan Taliwang yang dibudidayakan di perairan desa Kertasari dengan produksi sebesar 94,5 ton.

➤ Budidaya Air Payau (Tambak)

Komoditas tambak yang dibudidayakan di Kabupaten Sumbawa Barat adalah udang windu, udang vannamee dan ikan bandeng. Udang windu merupakan komoditas perikanan yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan swasta dan petani tambak. Adapun daerah pertambakan potensial yang diusahakan untuk budidaya udang windu adalah kecamatan Seteluk, Taliwang dan Jereweh. Produksi udang windu di Kabupaten

Sumbawa Barat adalah sebesar 20 ton. Selain udang windu, ikan bandeng juga merupakan produk tambak yang diusahakan secara tradisional dan tersebar di seluruh areal tambak yang ada. Produksi bandeng di Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar 6 ton.

➤ **Budidaya Mutiara**

Budidaya mutiara dilakukan di beberapa lokasi yang sesuai dengan kondisi optimal untuk budidaya. Adapun lokasi budidaya mutiara di Kabupaten Sumbawa Barat adalah di kecamatan Seteluk, Taliwang, Jereweh dan Sekongkang. Luas areal yang berpotensi untuk budidaya mutiara adalah seluas 895 Ha, namun baru dimanfaatkan seluas 125 Ha. Produksi mutiara di Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar 15 Kg, dengan produksi tertinggi pada kecamatan Jereweh dengan produksi 10 Kg.

4). **Potensi Pulau-Pulau Kecil**

Pulau-pulau kecil adalah pulau-pulau yang berukuran kecil yang secara ekologis terpisah dari pulau induknya. Pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah 14 buah dengan luas mencapai 828,3 Ha. Pulau-pulau kecil tersebut tidak mempunyai penghuni tetap, tetapi sebagian dari pulau-pulau tersebut telah dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat untuk budidaya mutiara, budidaya rumput laut, penangkapan ikan, tempat

pengambilan sarang burung wallet dan pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu.

Sektor perikanan haruslah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah sebab dari sekian besar potensi yang ada dalam sektor tersebut ternyata masih sangat minim. Dari potensi produksi perikanan laut 259.040,60 ton, potensi perairan umum 2.109,60 ton, potensi perairan air tawar 1.875,10 ton, dan potensi perairan air payau 12.744,50 ton baru terealisasi masing-masing 34.541,01 ton (13,33 %) produk perikanan laut, 1.576,32 ton (74,72 %) produk perairan umum, 361,02 ton (19,25 %) produk perairan air tawar, dan 1.772,56 ton (13,91 %). Selain itu nilai ekonomis dari sektor ini juga sangat tinggi namun belum dimanfaatkan sepenuhnya. Masih minimnya produksi di sektor pertanian tersebut diprediksi sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan sumber daya nelayan terutama sarana dan prasarana tangkap. Oleh sebab itu penda harus cepat tanggap dengan kekurangan tersebut serta berusaha untuk segera mengadakan sarana dan prasara yang dibutuhkan masyarakat agar produksi tangkapannya meningkat yang secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

4.1.5. Peternakan

Berdasarkan jenis komoditi yang dihasilkan, potensi penyebaran komoditas atau hasil ternak unggulan dan penunjang di tiap kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut :

- 1). Kecamatan Taliwang potensial untuk komoditas sapi, kerbau, domba, dan itik.
- 2). Kecamatan Seteluk potensial untuk komoditas sapi, kerbau, kambing, babi, dan ayam buras.
- 3). Kecamatan Jereweh potensial untuk komoditas sapi, kerbau, kambing, kuda dan domba.
- 4). Kecamatan Brang Rea potensial untuk komoditas kerbau, sapi, kambing, itik dan entok.
- 5). Kecamatan Sekongkang potensial untuk komoditas sapi bali, sapi hisar, kerbau, kuda, ayam buras dan itik.

Dari potensi ketersediaan pakan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat yang setara dengan luas ladang penggembalaan sebesar 55.479 Ha maka jumlah ternak yang dapat ditampung sekitar 49.901 ekor. Sementara jumlah ternak besar (sapi, kerbau, kuda) saat ini berjumlah sekitar 30.558 ekor (61,24 %). Di sub sektor peternakan ternak sapi (sapi bali) merupakan komoditas unggulan, sedangkan kerbau, ayam buras dan kambing adalah komoditas andalan, serta sapi hisar, itik, entok, kuda dan domba adalah komoditas penunjang.

Dilihat dari perbandingan luas potensi ladang penggembalaan dan jumlah ternak yang diusahakan oleh masyarakat, ternyata sektor ini sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahkan menjadi salah satu produk komoditas unggulan daerah tersebut. Namun berdasarkan data dari Dinas

Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan, dan Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat diketahui bahwa pengusahaan ternak oleh petani/peternak di Kabupaten Sumbawa Barat sebagian kurang intensif dengan skala usaha kecil, sehingga perkembangan populasi ternak relative lambat. Oleh sebab itu, Pemda haruslah mengupayakan pembuatan usaha peternakan dalam skala yang besar sehingga perkembangan sektor ini dapat lebih cepat dan signifikan.

4.1.6. Perkebunan

Dengan menggunakan model pendekatan yang sama potensi sebaran komoditas unggulan dan penunjang tiap kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

- 1). Kecamatan Taliwang potensial untuk komoditas asam, kapuk, kelapa, jambu mete, tembakau rakyat, jarak, tebu, wijen, kemiri, pinang, kopi, tembakau Virginia, dan lada.
- 2). Kecamatan Seteluk potensial untuk komoditas kelapa, jambu mete, jeruk dan asam.
- 3). Kecamatan Jereweh potensial untuk komoditas kelapa, asam dan jambu mete.
- 4). Kecamatan Brang Rea potensial untuk komoditas jarak, jambu mete, kopi, kemiri, lada, kelapa, asam, coklat dan vanili.
- 5). Kecamatan Sekongkang potensial untuk komoditas kelapa dan jambu mete.

Potensial lahan yang tersedia untuk komoditas tanaman perkebunan di Kabupaten Sumbawa Barat cukup besar, dari potensi yang tersedia hanya sebagiankecil saja yang telah diusahakan dengan produktivitas yang relatif rendah. Peluang investasi pada sektor perkebunan selain terbuka pada kegiatan budidaya juga sangat berpeluang pada pengembangan agroindustri. Dilihat dari ketersediaan lahan potensial serta sisa lahan yang belum dimanfaatkan; jambu mete, kelapa, asam dan jeruk memiliki prospek pengembangan cukup besar. Mengenai potensi peningkatan produksi komoditas perkebunan di Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

1). Jambu Mete

Jambu mete adalah komoditas unggulan perkebunan, potensi lahan pengembangan jambu mete tersedia sebesar 13.221,75 Ha dan sudah dimanfaatkan sebesar 854 Ha dengan produksi sebesar 119,40 ton.

2). Kelapa, Asam, dan Jarak

Kelapa, asam, dan jeruk merupakan komoditas andalan perkebunan, potensi lahan pengembangan kelapa adalah 8.732,25 Ha yang sudah dimanfaatkan sebesar 1.077 Ha dengan produksi sebesar 597,40 Ton/Thn. Untuk pengembangan komoditi asam terdapat potensi lahan sebesar 1.827,75 Ha yang sudah dimanfaatkan 134,25 Ha dengan total produksi sebesar 102,39 ton/thn sedangkan untuk pengembangan jarak terdapat potensi lahan 3.644,5 Ha dan sudah dimanfaatkan 68,5 Ha dengan produksi 10 ton/thn.

3). Kopi, Kapuk, Pinang dan Kemiri

Komoditas ini merupakan penunjang, untuk kopi, potensi lahan tersedia 871 Ha yang sudah dimanfaatkan 231 Ha dengan produksi sebesar 108,55 ton/thn. Kapuk potensi lahan tersedia 1.240 Ha yang sudah dimanfaatkan dan menghasilkan seluas 40 Ha dengan produksi sebesar 10,28 ton/thn. Pinaug, potensi lahan 725 Ha yang dimanfaatkan dan sudah berproduksi seluas 4,5 Ha dengan total produksi sebesar 1,49 ton/thn. Kemiri, potensi lahan 7,55 Ha yang sudah dimanfaatkan dan sudah berproduksi seluas 4,6 Ha dengan total produksi sebesar 26,26 ton/thn.

Produktivitas dari berbagai jenis perkebunan tersebut relatif masih rendah diindikasikan sebagai akibat karena sebagian besar pengusahannya kurang intensif dan masih menggunakan teknologi yang masih sederhana. Selain itu, masih minimnya masyarakat yang mau menggeluti bidang perkebunan. Dari sekian banyak jenis komoditi perkebunan yang ada, nampaknya hanya kelapa, jambu mete dan kopi yang mendapat perhatian dari masyarakat. Melihat hal tersebut, pemda Kabupaten Sumbawa Barat haruslah bekerja keras dalam menumbuhkan minat dan kemauan masyarakat guna mengembangkan sektor perkebunan, terutama untuk komoditi yang bernilai ekonomis tinggi dan sangat diperlukan saat ini, seperti misalnya perkebunan jarak.

4.2. Potensi Sumberdaya Manusia di Kabupaten Sumbawa Barat

Dari data sumberdaya manusia yang disajikan pada tabel II pada Bab sebelumnya, dapat dihitung angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan rumus jumlah penduduk belum produktif ditambah jumlah penduduk tidak produktif dibagi jumlah penduduk produktif yang menghasilkan angka sebesar 56,26 %. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (tenaga kerja) harus menanggung hidup 56 orang penduduk usia belum dan tidak produktif (bukan tenaga kerja).

Jika dilihat dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu indeks komposit yang dikembangkan UNDP untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia dari berbagai bidang, meliputi: kesehatan (Angka Harapan Hidup), pendidikan (Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah), dan pendapatan (Paritas Daya Beli), maka kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Sumbawa Barat dengan pencapaian IPM 61,9 (kesehatan 56,0; pendidikan 73,6; pendapatan 56,1) berada pada urutan kelima dari 9 kabupaten/kota yang berada di Nusa Tenggara Barat (IPM Provinsi NTB 60,6). Meskipun berada di atas rata-rata provinsi, namun nilai IPM Kabupaten Sumbawa Barat masih tergolong dalam kriteria "menengah ke bawah" (keterangan: tinggi = IPM 80,0 – 100,0; menengah atas = IPM 66,0 – 79,0; menengah bawah = IPM 50,0 – 65,9; rendah = IPM < 50,0) {Sumber: Data Sekunder dari Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat}.

Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat yang masih minim, akan menghambat atau setidaknya memperlambat geliat pembangunan di daerah tersebut. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa sebagian besar jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat masih bermata pencaharian dengan mengandalkan sektor primer (pertanian dalam arti luas, yang di dalamnya termasuk perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan). Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam masa pemerintahan Bupati yang terpilih pada 6 Juli 2005 ini, berkomitmen untuk membangun dan meningkatkan pembangunan sektor sekunder yang menggabungkan sektor pertanian dan sektor industri, atau lebih dikenal dengan agroindustri. Yang ke depannya akan mengarah pada pembangunan sektor tersier (jasa).

Selain itu, tingkat IPM masyarakat yang tidak begitu tinggi juga merupakan program utama pembangunan daerah ini ke depannya. Langkah nyata dalam mewujudkan program tersebut adalah dengan diberlakukannya kebijakan sekolah dan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat sejak tanggal 1 Januari 2006. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan tingkat IPM masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat dapat meningkat.

4.3. Pelaksanaan Kewajiban Daerah sebagai Daerah Otonom

4.3.1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

Kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2004 dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar berkualitas rendah, yaitu tamat SD, tidak tamat SD dan belum sekolah sebanyak 73.194 orang (79,21 %), penduduk belum tamat SD sebanyak 6.375 orang (6,90 %), penduduk berpendidikan menengah (SLTP dan SLTA) sebanyak 12.326 orang (13,34 %), dan penduduk berpendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) hanya 504 orang (0,55 %) (*Sumber: Data Sekunder dari Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat*).

Tingkat pendidikan penduduk yang sebagian besar masih rendah, perlu diimbangi dengan peningkatan keterampilan melalui berbagai jenis pelatihan/kursus, sehingga partisipasi dan produktivitas penduduk dalam pembangunan dapat meningkat. Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat yang termasuk dalam kelompok usia sekolah meliputi : umur 7-12 tahun untuk SD sebanyak 11.717 orang (12,68 %), umur 13 – 15 tahun untuk SLTP sebanyak 5.647 orang (6,11 %), dan umur 16 – 18 tahun untuk SLTA sebanyak 5.709 orang (6,18 %).

Selain bidang pendidikan, bidang kesehatan juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Rasio besarnya penduduk terhadap fasilitas kesehatan masih sangat besar. Fasilitas kesehatan belum sepenuhnya dimiliki oleh semua desa, misalnya keberadaan Puskesmas

pembantu belum mencakup seluruh desa. Demikian pula dengan petugas kesehatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat belum mencukupi, sehingga pemerintah masih terus menambah jumlah petugas kesehatan dengan segala keterbatasan yang ada.

Jika dilihat dari tingkat kesejahteraan sosial, sebagian besar rumahtangga penduduk (58,04 %) di Kabupaten Sumbawa Barat sudah tergolong cukup baik sebab sudah dapat dikategorikan ke dalam Keluarga Sejahtera II – Keluarga Sejahtera III+. Sementara itu, rumahtangga penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang masih relatif rendah sebanyak 41,96 % sebab termasuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Dalam pidatonya pada kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat mengatakan bahwa selain kebutuhan akan sandang dan pangan, masyarakat juga membutuhkan perumahan yang layak. Untuk itulah pada kegiatan tersebut, Bupati menginstruksikan kepada seluruh kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat untuk mendata 10 buah rumah terburuk yang ada di setiap desa guna diberikan bantuan untuk mendirikan bangunan yang layak huni.

Dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut jelaslah terlihat bagaimana komitmen dan keinginan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam memenuhi amanat undang-undang yang dibebankan kepadanya yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam mencapai tujuan akhir sebuah pemerintahan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3.2. Peningkatan Pelayanan Dasar Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu program yang sedang digalakkan pemerintah. Untuk itu sarana dan prasarana pendidikan terus ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun mutunya. Penduduk usia sekolah diharapkan bisa tertampung seluruhnya pada sekolah yang telah ada. Adanya wajib belajar sembilan tahun, program BOS dan sekolah percontohan sangat membantu mengentaskan penduduk dari buta huruf, memperluas kesempatan untuk belajar dan sekaligus meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia daerah ini.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan telah lama dikemukakan oleh para ilmuwan. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal. Prasarana pendidikan formal (sekolah) yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2005 telah tersedia di semua jenjang, baik negeri maupun swasta dengan jumlah 136 buah buah yang meliputi TK 42 buah, SD/MI 85 buah, SLTP/MTs 23 buah, SMU 9 buah dan Perguruan Tinggi. Namun dari jumlah tersebut ada beberapa buah sekolah yang belum mempunyai gedung sendiri, sehingga masih harus menumpang pada gedung

atau bangunan lain yang bisa digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.

Perbandingan jumlah gedung sekolah dan sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu TK 30:40 buah, SD/MI 80:85 buah, SLTP/MTs 22:23 buah, SMU 7:9 buah, dan Perguruan Tinggi 1 buah. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat belum mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana pendidikan.

Perbandingan jumlah peserta didik dan tenaga pengajar dari setiap jenjang pendidikan adalah TK 138 orang dan 84 orang, SD/MI 11.943 orang dan 847 orang, SLTP/MTs 4.445 orang dan 149 orang, SMU 2.434 orang dan 74 orang, dan PT 190 orang dan 60 orang. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa jumlah tenaga guru masih sangat kurang untuk memberikan pendidikan yang efektif dan efisien kepada para muridnya. Hal ini kemudian diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat masih dirasa sangat kurang sekali karena belum termasuk ke dalam kategori kelas ideal, yaitu 1 orang guru mengajar 20-25 siswa dalam 1 kelas. Sedangkan di Kabupaten Sumbawa Barat tiap guru mengajar 35-45 orang dalam 1 kelas. Sedangkan untuk lembaga pendidikan nonformal meliputi berbagai macam kursus atau pelatihan keterampilan seperti mengetik,

otomotif, listrik, bangunan, kerajinan dan komputer telah ada di daerah tersebut.

Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui sektor pendidikan dapat dilihat dengan dikeluarkannya kebijakan Bupati Sumbawa Barat yang menetapkan biaya pendidikan gratis bagi seluruh warga Kabupaten Sumbawa Barat dari TK hingga SMU. Meskipun Juklak dan Juknis kebijakan tersebut masih dalam tahap proses penyusunan, namun penerapannya telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2006.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat, fasilitas pendidikan gratis diberikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dengan meneruskan kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan wajib belajar 9 tahun pemberian dana BOS untuk tingkat pendidikan SD dan SMP. Fasilitas pendidikan gratis kepada masyarakat tersebut berupa pembebasan dari biaya komite sekolah/SPP yang besarnya dirinci berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu : TK Rp. 15.000,- per siswa/bulan, SD Rp. 5.000,- per siswa/bulan (dana BOS Rp. 19.500,- per anak/bulan), SMP Rp. 5.000,- per siswa/bulan (dana BOS Rp. 27.500,- per anak/bulan), SMA Rp. 40.000,- per anak/bulan, dan SMK Rp.45.000,- per anak/bulan (*Sumber: Data Primer/Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat*).

Menurut Wakil Kepala SMU Negeri 1 Taliwang saat diwawancara di kantornya menyatakan bahwa sebenarnya sekolah tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari diterapkannya program pendidikan gratis tersebut. Menurutnya, APBS sekolah tidak terpengaruh dengan besarnya dana yang diterima dari APBD sebagai kompensasi ditiadakannya biaya komite sekolah, sebab dana yang diterima tersebut mempunyai nilai yang sama dengan nilai yang akan diterima sekolah kebijakan tersebut tidak diterapkan. Dengan demikian jelasnya bahwa tujuan utama diterapkan kebijakan pendidikan gratis tersebut adalah semata-mata untuk merangsang kemauan belajar dan bersekolah dari masyarakatnya, disamping untuk mengurangi beban masyarakat dalam membayar biaya sekolah.

4.3.3. Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Prasarana kesehatan berupa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) telah tersedia pada semua kecamatan/desa di Kabupaten Sumbawa Barat (tetapi rumah sakit belum ada) meliputi puskesmas terdapat 6 buah puskesmas, 16 buah Puskesmas pembantu, 16 buah polindes, Posyandu 37 buah dan 13 buah tempat praktek dokter. Prasarana kesehatan tersebut didukung oleh tenaga medis sebanyak 174 orang, dengan perincian: dokter umum 10 orang, dokter gigi 4 orang, apoteker 2 orang, sarjana kesehatan 4 orang, paramedis 89 orang, paramedis perawat 38 orang, paramedis non perawat 12 orang, dan nonmedis 15 orang.

Seiring dengan komitmen peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, di bidang kesehatan juga dikeluarkan kebijakan tentang Pelayanan Kesehatan gratis bagi seluruh warga Kabupaten Sumbawa Barat. Kebijakan tersebut diberikan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Seperti halnya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan pun kebijakan tersebut hanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas, Pustu yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan pihak Puskesmas dan Pustu hanya akan mendapat kompensasi dari biaya pengobatan yang diberikan kepada masyarakat yang diambil dari APBD, yang besarnya disesuaikan dengan laporan transaksi yang berlangsung selama proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

4.3.4. Pengembangan Kehidupan Demokrasi

Demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat mengalami peningkatan terutama dalam hal partisipasi rakyat di Indonesia. Hal itu dapat dilihat pada keterlibatan secara langsung rakyat dalam memilih pemimpin-pemimpinnya dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Di Kabupaten Sumbawa Barat tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pemilihan umum mengalami perubahan pada setiap perhelatan pesta rakyat lima tahunan tersebut. Pada Pemilu 1999, jumlah pemilih terdaftar di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 46.762 orang. Sedangkan

banyaknya pemilih yang terdaftar pada Pemilu Legislatif tahun 2004 adalah sebanyak 60.084 orang pemilih, namun yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 45.688 pemilih. Pada pemilu Pilpres 5 Juli 2004 dengan jumlah pemilih terdaftar relatif sama dengan pemilu legislatif, jumlah pemilih adalah sebanyak 48.047 pemilih dan pada pemilu 20 September 2004 jumlah pemilih adalah sebanyak 45.666 pemilih.

Terbukanya keran demokrasi yang lebih besar untuk memilih pemimpin daerah secara langsung yang dituangkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang gerak yang lebih besar kepada rakyat untuk memilih sendiri pemimpinnya. Di Kabupaten Sumbawa Barat, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dilaksanakan bersamaan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia pada tanggal 6 Juli 2005.

Pada pelaksanaan pilkada tersebut, sebanyak 70.147 orang terdaftar sebagai pemilih pada pilkada perdana kabupaten yang baru saja lahir tersebut. Jumlah pemilih terdaftar terbanyak berturut-turut berasal dari Kecamatan Taliwang 30.158 pemilih, Seteluk 15.284 pemilih, Jereweh 11.150 pemilih, Brang Rea 8.430 pemilih, dan Sekongkang 5.125 pemilih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54.916 pemilih yang menggunakan hak suaranya pada pilkada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dari data di atas dapat dilihat bagaimana peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal menentukan masa depan daerahnya. Peningkatan

jumlah pemilih terdaftar dari Pemilu 1999 ke Pemilu Legislatif 2004 adalah merupakan salah satu dampak dari banyaknya pendatang yang mencari pekerjaan di bidang pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat sejak tahun 2000. Selain itu, hal ini dapat dilihat juga sebagai respon masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyambut kebijakan pemerintah dalam menetapkan sistem Pemilu secara langsung dalam memilih wakil yang rakyat yang duduk di lembaga dewan. Peningkatan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 5 Juli 2004 juga merupakan bentuk respon dan antusiasme masyarakat terhadap para calon Presiden yang akan memimpin negara ini lima tahun ke depan. Penurunan jumlah pemilih pada Pilpres 20 September 2004 hanyalah merupakan bentuk kekecewaan dari pendukung salah satu pasangan calon yang calonnya kalah pada Pilpres babak pertama.

Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkadal), merupakan momentum penting paling strategis dalam memilih pemimpin yang berkualitas serta dapat diterima secara umum sehingga dukungan yang luas dapat diperoleh, tidak hanya dukungan secara horizontal, tetapi juga vertikal dari elit politik yang ada di tingkat nasional dan pemerintah pusat. Dengan pemberian otonomi yang luas, masyarakat daerah mewujudkan impiannya untuk mengatur daerahnya melalui pemimpin yang dipercaya dan kapabel. Melalui pilkada yang demokratis, diharapkan tidak ada lagi klaim-klaim sepihak dan sakwasangka terhadap siapa yang paling berhak memimpin suatu

daerah. Dengan kesadaran itulah jumlah pemilih pada pilkada meningkat dibandingkan dengan jumlah pemilih pada pemilu-pemilu sebelumnya.

4.3.5. Penyediaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum yang Layak

4.3.5.1. Fasilitas Pertanian dalam Arti Luas

Keberhasilan pembangunan pertanian, terutama tanaman pangan di lahan sawah sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana pengairan/irigasi. Jumlah sarana irigasi di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2004 sebanyak 57 unit yang tersebar di seluruh kecamatan, terdiri atas irigasi PU 6 unit dan irigasi desa 51 unit. Luas lahan sawah yang potensial terairi oleh prasarana irigasi tersebut mencapai 6935 Ha, sedang prasaran pengairan untuk lahan pertanian kering belum tersedia. Sementara itu, sarana atau alat pertanian yang tercatat di Kabupaten Sumbawa Barat berupa traktor 153 unit, sprayer 396 buah, huller 4 unit, RMU 1 unit, dan penggilingan padi besar/pabrik 3 unit.

Masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian terutama dalam hal pengairan di Kabupaten Sumbawa Barat membuat pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat mendesak pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi untuk menyediakan sarana pengairan yang memadai. Untuk waktu dekat ini pemda Kabupaten Sumbawa Barat memprioritaskan pembangunan bendungan Bintang Bano, yang menurut salah seorang sumber mengatakan bahwa bendungan ini akan menjadi yang terbesar di NTB jika dilihat dari

nilai fungsionalnya, karena dapat menghasilkan listrik yang jika dijual dapat menghasilkan ± Rp. 4 milyar per tahunnya. Selain itu dapat pula dimanfaatkan untuk sarana air bersih, peternakan dan perikanan di samping fungsi pokoknya untuk mengairi lahan pertanian masyarakat.

Sementara itu, kegiatan perikanan laut oleh nelayan di Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis prasarana dan sarana tangkap. Prasarana tangkap yang umum digunakan nelayan dalam melakukan operasi penangkapan ikan ada 3 jenis yaitu jukung, motor tempel, dan perahu motor. Akibatnya jangkauan operasi penangkapan (jarak tempuh) terutama bila gelombang besar hanya terbatas sekitar 2 – 4 km dari pantai. Sementara itu, sarana tangkap yang sering digunakan oleh nelayan berupa jaring dan pancing. Masih sederhananya sarana dan prasarana tangkap bagi nelayan di daerah menyebabkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil menangkap ikan, masih terbilang rendah. Peran pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan untuk turut campur tangan dalam bidang ini.

4.3.5.2. Fasilitas Energi dan Air Bersih

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan banyak ditentukan oleh keberadaan listrik. Listrik mempunyai fungsi sangat strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Desa yang mempunyai listrik mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan desa

yang belum mempunyai listrik. Sektor lainnya bisa berjalan baik bila ditunjang dengan adanya listrik. Sebagai contoh sektor industri akan banyak dipengaruhi oleh listrik.

Sumber energi yang sangat penting peranannya dalam mendukung pelaksanaan berbagai aktivitas, baik di bidang sosial maupun ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat adalah listrik PLN. Jumlah volt ampere tersambung listrik di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 8.071.760 VA, sedang kapasitas produksi yang tersedia sebanyak 11.640.996 Kwh. Hampir semua desa di Kabupaten Sumbawa Barat telah mempunyai jaringan listrik PLN, dimana pemanfaatannya masih didominasi oleh pelanggan dari kelompok rumah tangga (11.360 pelanggan), disusul oleh kelompok usaha (456 pelanggan), sosial (212 pelanggan), gedung (56 pelanggan), jasa (14 pelanggan), dan industri (4 pelanggan). Sementara itu, desa yang belum berlistrik ada 3 desa yang berada di desa di kecamatan Sekongkang karena letaknya yang terpencil.

Air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum, mandi dan cuci dari rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat sebagian besar bersumber dari pompa (52,06 % rumah tangga) dan sumur perigi (40,55 % rumah tangga). Pompa dan sumur perigi tersebut sebagian besar dibuat sendiri oleh penduduk. Sumber air yang disediakan oleh PAM masih sangat terbatas dengan jumlah rumah tangga pengguna sebanyak 0,34 %. Jumlah

rumahtangga yang masih mengandalkan sungai dan air hujan sebagai sumber air bersih sebanyak 7,05 % rumah tangga.

4.3.5.3. Fasilitas Perhubungan

Prasarana penunjang kelancaran lalu lintas seperti jalan dan jembatan sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi bangsa. Kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh prasarana tersebut. Suatu daerah dapat dikatakan terisolir bila tidak memiliki jalan maupun jembatan. Begitu pentingnya prasarana tersebut sehingga keberhasilan pemerintah sering diukur dari keberhasilannya membangun prasarana tersebut. Prasarana perhubungan yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat berupa jalan dan jembatan, pelabuhan laut/dermaga, dan pelabuhan udara. Dari data yang ada diketahui bahwa jalan beraspal dengan kondisi baik sepanjang 143,82 km yang merupakan jalan provinsi/kabupaten yang kelima kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis permukaan jalan yang menuju/masuk ke desa/dusun di Kabupaten Sumbawa Barat berupa jalan diperkeras/kerikil 68,60 km, dan jalan tanah 63,20 km yang merupakan jalan kabupaten/desa dengan kondisi yang kurang baik dan bahkan pada beberapa ruas jalan ada yang rusak berat. Kondisi tersebut dapat menghambat arus lalu lintas kendaraan, barang dan penumpang, sehingga pada gilirannya aktivitas pembangunan tidak dapat berlangsung secara normal. Pelabuhan laut/dermaga di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak dua buah yaitu pelabuhan Poto Tano dan

pelabuhan Benete, sedangkan pelabuhan hanya satu buah di Sekongkang, walaupun hanya persifat perintis.

Banyaknya sarana perhubungan darat baik umum maupun non umum dapat dilihat pada data-data dari kantor Polres dan Dinas Perhubungan. Armada angkutan yang terdaftar di Polres Sumbawa dibedakan menurut jenis penggunaan kendaraan yaitu mobil beban, mobil angkutan, dan mobil penumpang. Sedangkan kendaraan angkutan umum yang beroperasi, menurut data dinas perhubungan dibedakan berdasarkan jenis trayek antara lain angkutan kota 214 buah, angkutan pedesaan 370 buah, angkutan kota dalam provinsi 46 buah, angkutan kota antar provinsi 15 buah, angkutan tradisional 2.939 buah. Untuk bus berperan dalam mengangkut penumpang dan barang dari kota-kota kecamatan ke ibukota kabupaten dan provinsi atau sebaliknya. Truk dan colt umumnya mengangkut hasil-hasil produksi pertanian dalam volume besar yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

4.3.5.4. Fasilitas Informasi dan Komunikasi

Pemilikan atau penguasaan sarana informasi dan komunikasi oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat secara umum nampaknya masih terbatas, yaitu radio 1.982 rumah tangga, TV yang dilengkapi antena parabola cukup banyak (TV 1.165 unit dan antena parabola 457 unit). Ketiga sarana komunikasi tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk

mendengar/menonton hiburan, sedangkan informasi pendidikan relatif terbatas. Jumlah kantor pos di daerah ini belum terjadi perubahan semenjak dimekarkan yaitu sebanyak 4 buah, semuanya merupakan kantor pos pembantu sebab kantor pos induk masih berada di kabupaten Sumbawa. Data dikantor Pos menunjukkan bahwa banyaknya rekening masuk dan keluar setaip tahun relatif besar. Ini menunjukkan bahwa kantor pos masih merupakan sarana yang bisa diandalkan dalam memperlancar arus pengiriman barang maupun uang.

Selain pos, sarana yang sering digunakan dalam memperlancar komunikasi adalah telepon. Jumlah pelanggan telepon juga masih terbatas yaitu sebanyak 1.411 rumah tangga/kantor, wartel/yantel sebanyak 29 unit.

4.3.5.5. Fasilitas Sosial Budaya

4.3.5.5.1. Prasarana Ibadah

Prasarana ibadah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2004 adalah mesjid 147 buah, gereja 1 buah dan pura 2 buah. Prasarana keagamaan/ibadah lain yang cukup banyak tersebut merupakan yang cukup besar dalam menunjang pengembangan aktivitas keagamaan, sehingga diperoleh sumberdaya manusia yang tekun, sabar dan bersemangat tinggi dalam menjalankan berbagai aktivitas pembangunan.

4.3.5.5.2. Olahraga dan seni

Kelompok olah raga yang tercatat dan berkembang di Kabupaten Sumbawa Barat di antaranya: sepak bola 43 klub, bola volley 53 klub,

bulu tangkis 49 tim, tennis meja 62 tim, dan sepak takraw 46 tim. Pelatihan dan pertandingan berbagai cabang olahraga tersebut biasanya intensif dilakukan pada bulan Juni-Oktober sebab bulan tersebut adalah musim kemarau yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan di lapangan.

Kelompok kesenian yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat masih sangat sedikit diantaranya: tarian 5 kelompok, musik 1 grup, kasidah rabana 25 grup, dan sakeco (kesenian tradisional) 11 kelompok. Kelompok-kelompok kesenian tersebut kerap kali dilihat pada acara-acara perkawinan, khitanan, dan perayaan hari-hari besar keagamaan dan kebangsaan.

4.3.5.6. Fasilitas Pemerintahan

4.3.5.6.1. Lembaga Pemerintahan

Lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat adalah lembaga-lembaga yang telah disebutkan sebelumnya pada Bab III. Usia setiap Lembaga Pemerintahan tersebut baru berkisar 2 tahun dan dengan jumlah aparat pemerintahan yang masih terbatas, sehingga perannya dalam pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat masih belum optimal.

4.3.5.6.2. Aparatur Pemerintahan

Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumbawa Barat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 01 tahun 2004 terdapat jabatan struktural yang masih lowong. Hal ini disebabkan masih kurangnya jumlah aparatur pemerintah. Jumlah pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dibanding dengan jumlah formasi jabatan struktural yaitu: Eselon II A dengan formasi 1 orang masih lowong, Eselon II B dari 18 formasi yang ada baru terisi oleh 17 orang, Eselon III A dari 72 formasi baru terisi oleh 38 orang, Eselon IV A dari 178 formasi baru terisi oleh 91 orang, dan Eselon IV B dari 3 formasi belum terisi. Jadi, dari 272 formasi jabatan struktural yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat baru diisi oleh 146 orang. Dengan demikian masih diperlukan sekitar 126 orang untuk mengisi posisi jabatan struktural yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Keadaan aparatur di Kabupaten Sumbawa Barat dengan kebutuhan sampai dengan 30 Juli 2005 sebagai berikut: jumlah kebutuhan aparatur sebanyak 2.879 orang, jumlah aparatur yang ada sebanyak 1.547 orang, jadi terjadi kekurangan sebanyak 1.547 orang. Sementara itu, jumlah tenaga honorer/pegawai tidak tetap sebanyak 549 orang yang terdiri dari tenaga admisnistrasi 437 orang, tenaga guru 118 orang, dan tenaga kesehatan sebanyak 44 orang.

4.3.5.7. Fasilitas Pelayanan Umum

4.3.5.7.1. Pelayanan Catatan Sipil

Penyelenggaraan pencatatan sipil di Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dengan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Hingga Desember 2005, Kantor Catatan Sipil telah menerbitkan 3.960 akta kelahiran atau 98,35 % dari target 4.000 akta kelahiran, 2 buah akta kematian, dan 1 buah akta perkawinan.

4.3.5.7.2. Perijinan dan Keimigrasian

Salah satu lembaga pelayanan strategis yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah yaitu lembaga perizinan dan keimigrasian, terutama bagi daerah-daerah yang kaya akan sumberdaya alam dan potensi pariwisata. Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah yang kaya sumberdaya alam akan menarik minat para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sumbawa Barat, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Demikian juga dengan di sektor pariwisata, keindahan alam Kabupaten Sumbawa Barat menjadi penggerak proses akselerasi pembangunan yang terus berjalan, dan hasilnya secara langsung akan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pada kondisi seperti ini,

membutuhkan pelayanan yang cepat, singkat, dan mudah, terutama pada pelayanan perizinan dan keimigrasian.

4.3.5.7.3. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Salah satu kewenangan strategis daerah kabupaten/kota adalah dalam fungsi pelayanan umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Sebab ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perumusan kebijakan strategis yang mengarah pada penciptaan kondisi yang kondusif terus dikembangkan dengan melibatkan secara aktif peran dan dukungan masyarakat.

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah membentuk lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengawasan, penegakan, dan pengerahan personil dalam rangka pembinaan ketertiban serta penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencakup pula di dalamnya perumusan dan penetapan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum di bidang ketentraman dan ketertiban umum, sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

4.3.5.7.4. Pelayanan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Desa adalah satuan pemerintahan terkecil yang berada di tingkat paling rendah di bawah kecamatan yang merupakan barisan terdepan pembangunan nasional dan selalu menjadi tumpuan setiap program pembangunan, baik dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Keberhasilan program pembangunan di tingkat desa tentu tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan, terutama pelayanan dari kecamatan ke desa. Pelayanan dan pembinaan kecamatan ke desa pada lima kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, tetapi belum diadakan secara maksimal. Hal ini disebabkan keterbatasan aparatur kecamatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini diakui, bahwa sampai saat ini jumlah aparatur pemerintah kecamatan pada lima kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat dengan kualifikasi dan kompetensi masih sangat terbatas.

Secara umum, jumlah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat belum cukup memadai dalam konteks sebuah kabupaten. Hal yang paling nyata yang dapat dilihat adalah masih sangat kurangnya fasilitas pemerintahan yang ada, yang ditandai dengan masih banyaknya kantor-kantor pemerintah yang masih belum memiliki kantor sendiri dan masih harus menumpang pada kantor/gedung lain. Namun hal ini dapat dimaklumi mengingat umur Kabupaten Sumbawa

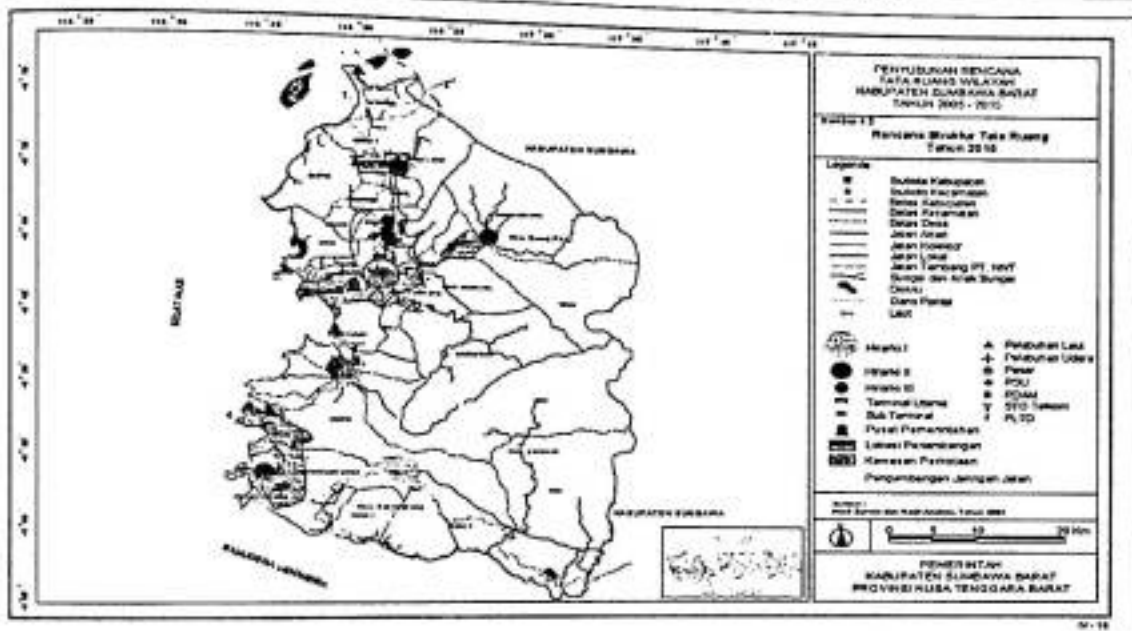
Barat yang masih seumur jagung sehingga wajarlah belum memiliki fasilitas pelayanan masyarakat yang lengkap.

Selain dalam bentuk fisik, fasilitas pelayanan dalam hal kualitas dan kuantitas aparat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat juga dirasa masih kurang, terutama di tingkat desa yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk itulah pemda harus cepat tanggap untuk memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas pegawainya sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

4.3.6. Perencanaan Tata Ruang Daerah

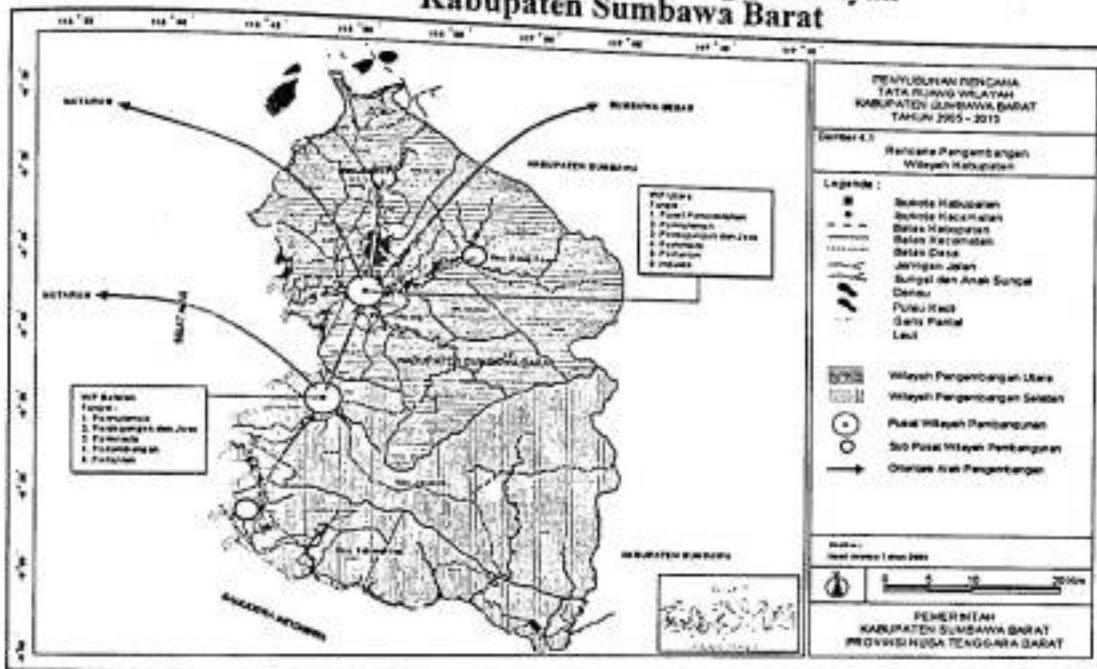
Pengembangan struktur ruang kabupaten, selain berdasarkan pada adanya potensi kecenderungan, juga mengarah pada faktor pembentukan struktur ruang optimal. Konsep struktur tata ruang Kabupaten Sumbawa Barat di masa mendatang dikembangkan melalui pengelolaan potensi sumberdaya yang ada pada setiap wilayah kecamatan terhadap jenis kegiatan yang akan berkembang, pengembangan infrastruktur dan luasan wilayah sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing kecamatan yang dikehendaki di Kabupaten Sumbawa Barat. Konsep struktur tata ruang tersebut dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar 4.3.6.1
Peta Rencana Struktur Tata Ruang
Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015



Berdasarkan pertimbangan pola sebaran kegiatan, fungsi dari setiap kecamatan dan kondisi ekosistem, maka secara makro konsep wilayah pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat dibagi menjadi dua wilayah pembangunan yang dapat dilihat pada peta :

Gambar 4.3.6.2
Peta Rencana Pengembangan Wilayah
Kabupaten Sumbawa Barat



1. Wilayah Pembangunan Utara, meliputi Kecamatan Seteluk (dan pelung/rencana dibentuknya Kecamatan Poto Tano), mempunyai fungsi sebagai pusat pengembangan lahan kering, perikanan dan kelautan, perindustrian dan perdagangan, serta perhubungan. Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Brang Rea, dengan wilayah pusat pengembangannya adalah kecamatan Taliwang yang mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, pusat pendidikan, perdagangan, jasa keuangan dan perusahaan, serta pengembangan pertanian lahan basah/sawah dengan komoditasnya tanaman pangan musim.
2. Wilayah Pembangunan Selatan, meliputi Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang, dengan wilayah pusat pengembangannya adalah

kecamatan Jereweh yang mempunyai fungsi sebagai pusat jasa industri, pertambangan, pemukiman dan pariwisata.

Dalam konsepsi pengembangan wilayah dan penataan struktur tata ruang kabupaten ditetapkan kebijakan pengembangan sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat bagian wilayah beberapa sub bagian wilayah kabupaten yang diarahkan dapat berkembang sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing.
2. Menata kawasan pusat-pusat kegiatan meliputi pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, kawasan sosial, layanan sosial, lokasi industri olahan, kawasan pertambangan, lembaga pemerintahan, perdagangan dan pelabuhan, serta kawasan pemukiman dalam rangka mengoptimalkan manfaat sumberdaya lahan yang terbatas demi nilai tambah yang lebih tinggi.
3. Pembangunan sarana dan prasarana ke seluruh bagian kabupaten secara integral sekaligus pembukaan layanan transportasi umum maupun kemudahan pencapaian ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan juga ke seluruh jurusan secara berimbang dalam rangka melayani kebutuhan transportasi yang terjangkau daya beli masyarakat umum.
4. Mempertahankan fungsi kawasan lindung, terutama area-area hutan lindung, kawasan konservasi, sungai dan mata air, ruang terbuka hijau, serta menata kawasan budidaya kabupaten sehingga tidak mengalami

transformasi dan perubahan fungsi secara berlebihan dalam rangka konservasi ekosistem.

Kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan untuk mengisi pusat dan sub pusat kabupaten. Pusat-pusat perdagangan dan komersial diarahkan di lokasi sebagai berikut:

1. Pusat perdagangan kabupaten, dengan jenis kegiatan termasuk kegiatan informal dengan skala pelayanan lokal dan wilayah.
2. Sub pusat perdagangan dan jasa di lima wilayah dikembangkan sesuai dengan arahan untuk melayani bagian wilayah kabupaten dengan tujuan untuk lebih meratakan jangkauan fasilitas kabupaten.

4.3.7. Sumberdaya Produktif Daerah

Secara garis besar struktur perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2004 didominasi oleh sektor pertambangan yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar 94,30 % di susul oleh sektor pertanian sebesar 2,10 % dan sektor lainnya di luar pertambangan dan pertanian hanya memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata di bawah 2 %. Total PDRB Kabupaten Sumbawa Barat atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 6.484.430.320.000,00. Sedangkan perkembangan PDRB perkapita secara riil atas dasar harga konstan PDRB perkapita Kabupaten Sumbawa Barat meningkat dari Rp. 1.533.805,06 pada tahun 2003 menjadi Rp. 1.570.376,53 pada tahun 2004 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2,38 %. Sedangkan dengan

subsektor pertambangan non migas laju pertumbuhannya mencapai 4,31 %.
 Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa Barat
 atas dasar harga berlaku tahun 2003-2004 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.3.7.1
 Kontribusi Masing-masing Sektor terhadap PDRB
 Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Lapangan Usaha I	2003 (%)		2004 (%)	
		2*	3	4*	5
1	Pertanian	37,20	2,65	34,37	2,10
2	Pertambangan dan Penggalian	6,74	93,36	6,76	94,30
3	Industri Pengolahan	2,28	0,16	2,23	0,14
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,26	0,02	0,26	0,02
5	Bangunan	9,48	0,68	9,85	0,60
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	19,35	1,38	19,53	1,19
7	Transportasi dan Komunikasi	13,1	0,95	14,18	0,87
8	Bank, Usaha Persewaan, & Jasa Perusahaan	1,02	0,07	1,10	0,07
9	Jasa-jasa	10,4	0,74	11,74	0,72
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Tanpa Subsektor Pertambangan Non Migas
 Sumber : Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005

Dari table di atas dapat dilihat bahwa sektor pertambangan berpengaruh besar terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Sumbawa Barat. Namun demikian, mengingat bahwa bahan tambang merupakan barang yang habis pakai dan tidak bisa diperbaharui kembali, maka pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat lebih memprioritaskan pembangunan pada sektor pertanian sebagai sektor pemberi kontribusi terbesar pada PDRB tanpa subsektor pertambangan non migas. Yang ditunjang pula dengan sebagian besar masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang berprofesi pada sektor tersebut.

4.1.2. Pembentukan dan Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan Kewenangan Daerah.

Semenjak dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2003, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dari 16 peraturan daerah yang dikeluarkan pada tahun 2005 ditambah 16 peraturan daerah pada tahun 2006 (sampai dengan 8 Februari) sebanyak 19 perda membahas tentang pajak dan retribusi daerah, 5 perda membahas tentang daerah mulai dari pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, APBD, kedudukan keuangan Kepala/Wakil Kepala Daerah, dan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Selebihnya adalah Perda yang membahas tentang Lambang, Motto, dan Hari Lahir Daerah Kabupaten Sumbawa Barat; Rencana Detil Tata Ruang Kota, dan masalah perizinan usaha; serta masalah pemekaran dan pembentukan desa-desa baru.

Dari keterangan di atas, dapat dilihat bahwa untuk tahun-tahun awal pembangunannya pemerintah lebih menitikberatkan pada pembangunan peningkatan keadaan sosial ekonomi kemasyarakatan, dengan mengatur aturan-aturan yang mengatur kegiatan perekonomian masyarakat dan juga sumber-sumber pendapatan bagi daerah.

4.3.8. Keuangan Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan

Dalam perencanaan anggaran dan belanja negara, pemerintah menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang berarti harus diusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, sedangkan prinsip dinamis berarti makin meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga kemampuan bertambah dan ketergantungan pada bantuan keuangan dari luar daerah semakin berkurang. Seiring dengan makin gencarnya penerapan otonomi di daerah kabupaten/kota diseluruh Indonesia, maka diharapkan pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik. Terlebih lagi terjadi karena Kabupaten Sumbawa Barat baru berdiri sekitar 2 tahun terlepas dari Kabupaten Sumbawa sebagai kabupaten induk, sehingga anggaran pembangunan yang ada masih belum begitu memadai dan digunakan sebaik-baiknya untuk membangun infrastruktur dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Sumber-sumber keuangan daerah yang memberikan andil cukup besar yaitu dana perimbangan, sedangkan PAD pada tahun anggaran 2005 memberikan andil masih sedikit.

Tahun anggaran 2005 merupakan tahun awal bagi Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai kabupaten yang baru terbentuk dalam perjalanannya menuju daerah otonom yang defenitif. Komponen utama dalam APBD tersebut terdiri atas: pendapatan/penerimaan, dan belanja/pengeluaran. Komponen utama pos

pendapatan dari APBD Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2005 adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Sumber Lainnya. Penerimaan PAD Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2005 diperkirakan sebesar Rp. 2.579.694.500,00 atau sekitar 2,39 % dari total penerimaan APBD (Rp. 108.070.727.060,00) yang terdiri dari: Pajak Daerah Rp. 513.625.000,00; Retribusi Daerah Rp. 986.839.500,00; Lain-lain PAD yang Sah Rp. 1.079.230.000,00. Dana Perimbangan untuk Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran tahun 2005 sebesar Rp. 100.211.022.560,00 yang bersumber dari: Bagi Hasil Pajak Rp. 12.820.926.163,00; Bagi Hasil atas Penggunaan Sumberdaya Alam Rp. 39.893.550.000,00 yang bersumber dari *land rent* dan iuran eksploitasi pertambangan; Dana Alokasi Umum Rp. 40.269.000.000,00; Dana Alokasi Khusus Rp. 4.000.000.000,00; dan Dana Perimbangan dari Provinsi NTB sebesar Rp. 3.227.546.397,00. Sementara itu, penerimaan dari sumber lainnya yang sah sebesar Rp. 5.280.010.000,00 yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Pusat berupa dana penyeimbang ad hoc sebesar Rp. 1.654.000.000,00; dan Bantuan dari Pihak Ketiga sebesar Rp. 2.250.000.000,00.

Alokasi belanja pada APBD Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 111.499.879.600,00 (terjadi defisit sebesar Rp. 3.429.152.540,00), yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah Rp. 68.137.215.500,00 (61,11 %) dan belanja publik Rp. 43.362.682.300,00 (38,89 %). Belanja aparatur meliputi komponen : belanja administrasi

umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Sementara belanja publik meliputi komponen : belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak disangka (Sumber: Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat).

Untuk tahun 2006, pendapatan Kabupaten Sumbawa Barat diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 206 % dari target 2005 sebesar Rp. 108.070.727.060,- menjadi Rp. 222.910.028.793.61,- Hal ini dipicu oleh perkiraan akan naiknya PAD Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 506 % dari target tahun lalu yaitu sebesar Rp. 2.579.694.500,- menjadi Rp. 15.634.892.000,- juga peningkatan perkiraan Dana Perimbangan pada tahun 2006 sebesar 105 % dari perkiraan penerimaan tahun 2005 sebesar Rp. 100.211.022.560,- menjadi Rp. 205.360.136.794,- Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan meningkat sebesar 158 % dari perkiraan penerimaan tahun 2005 sebesar Rp. 40.269.000.000,- menjadi Rp. 103.759.000.000,- sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) diperkirakan meningkat sebesar 619 % dari perkiraan tahun 2005 sebesar Rp. 4.000.000.000,- menjadi Rp. 28.750.000.000,-

Perkiraan peningkatan PAD terutama disebabkan oleh naiknya perkiraan penerimaan pajak daerah sebesar 53 % dari perkiraan tahun lalu Rp. 513.625.000,- menjadi Rp. 789.350.000,- serta kenaikan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 1.200 % dari perkiraan penerimaan tahun lalu sebesar

1.079.236.000,- menjadi Rp. 14.043.000.000,- Sebaliknya pada perkiraan pos penerimaan retribusi daerah terjadi penurunan sebesar 18 % dari perkiraan tahun lalu sebesar Rp. 986.839.500,- menjadi Rp. 802.542.000,- yang disebabkan oleh adanya program layanan pengobatan kesehatan gratis, penghapusan Retribusi Persampahan/Kebersihan, penghapusan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, dan penghapusan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil.

Peningkatan perkiraan penerimaan APBD yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2006 di Kabupaten Sumbawa Barat terjadi karena adanya maksimalisasi potensi yang dimiliki daerah, terutama pada sektor pajak. Dari sektor pajak, yang diisi oleh pajak hotel, pajak restaurant, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan bahan galian golongan C rata-rata mengalami kenaikan, kecuali pajak penerangan jalan yang mengalami penurunan sebesar 20 % dari Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 200.000.000,- Dari jumlah perkiraan penerimaan sektor pajak tahun 2005 sebesar Rp. 513.625.000,- diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 789.350.000,-

Selain itu, peningkatan PAD dari pos Lain-lain PAD yang Sah di sebabkan karena adanya peningkatan yang signifikan pada Penerimaan Jasa Giro yang naik 100 % dari Rp. 750.000.000,- pada perkiraan penerimaan tahun 2005 menjadi Rp. 1.500.000.000,- pada perkiraan penerimaan tahun 2006. Devident PT Bank NTB pada tahun 2006 rencananya akan mulai

diterima yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- Devident itu diterima karena pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun anggaran 2005 telah menyertakan modalnya sebesar Rp. 500.000.000,- pada PT. Bank NTB. Sumbangan Pihak Ketiga yang berasal dari PT. ASDP dan *Holding Ground* serta pihak ketiga lainnya juga mengalami peningkatan dari Rp. 1.079.230.000,- pada perkiraan penerimaan tahun lalu, menjadi Rp. 15.958.000.000,- pada perkiraan penerimaan tahun 2006 ini. Peningkatan pada perkiraan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga menurut penulis ini adalah merupakan dampak dari aktifnya pemerintah daerah dalam *menjemput bola* guna mencari investor yang berminat menanamkan modalnya dalam membangun daerahnya.

Peningkatan perkiraan penerimaan PAD Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun anggaran 2006, berbanding lurus dengan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusianya. Penurunan penerimaan daerah yang sangat drastis dari pos retribusi daerah sebagai akibat adanya program peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui program pengobatan kesehatan gratis yang terdiri dari administrasi/karcis loket, rawat inap, laboratorium, ambulance, surat keterangan sehat, dan KIA/persalinan yang berjumlah Rp. 66.888.000,-; penghapusan Retribusi Persampahan/Kebersihan sebesar Rp. 10.000.000,-; penghapusan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP sebesar Rp. 146.500.000,-; dan penghapusan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta

Catatan Sipil yaitu sebesar Rp. 135.000.000,-; yang totalnya mencapai Rp. 389.042.000,-

Dari data di atas, dapat kita lihat bahwa rata-rata pos penerimaan daerah dari sektor PAD mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mulai dapat mengidentifikasi dan mengolah dengan baik potensi-potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun daripada itu, tidak semua pos penerimaan mengalami kenaikan. Jika kita melihat pada pos penerimaan mana saja yang mengalami penurunan perkiraan penerimaan pada tahun anggaran 2006, kiranya kita dapat mengidentifikasi bahwa hanya bidang-bidang yang besentuhan langsung dengan masyarakat umumnya yang mengalami penurunan perkiraan penerimaan tersebut, seperti pajak penerangan jalan, pengobatan kesehatan gratis, Persampahan/Kebersihan, Penggantian Biaya Cetak KTP, dan Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa peningkatan rencana penerimaan APBD sedikit demi sedikit telah digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya, meskipun masih pada peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di daerah tersebut.

Peningkatan perkiraan penerimaan Dana Perimbangan dipicu oleh perkiraan kenaikan Bagi Hasil Pajak sebesar 31 % dari perkiraan penerimaan tahun 2005 sebesar Rp. 12.820.926.163,- menjadi 16.793.379.000,-; Bagi Hasil Bukan Pajak Sumberdaya Alam yang meningkat sebesar 29 % dari

perkiraan penerimaan tahun 2005 Rp. 36.893.950.000,- menjadi Rp. 51.257.755.633,-. Perkiraan peningkatan DAK tahun 2006 disebabkan karena perkiraan akan diterimanya DAK di bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pertanian, dan Bidang Lingkungan Hidup yang pada tahun anggaran 2005 DAK dalam bidang tersebut tidak dianggarkan. Selain itu, terjadi juga perkiraan peningkatan pada pos Bagi Hasil Pajak/Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 49 % dari perkiraan penerimaan tahun 2005 sebesar Rp. 3.227.546.397,- menjadi Rp. 4.779.642.161,-

Jika ditinjau dari asal penerimaan tiap-tiap dinas yang ada, maka PAD Kabupaten Sumbawa Barat sangat dipengaruhi oleh penerimaan dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) yang berasal dari Pajak Daerah Rp. 400.000.000; Retribusi Daerah Rp. 60.000.000; dan Lain-lain PAD yang Sah Rp. 13.680.000.000; Selain itu, dinas-dinas lain juga memberikan andil yang cukup besar yaitu: Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DISHUPPTAN) menyumbang Rp. 147.000.000 dari pos retribusi daerah; Diskanlut dan Peternakan sebesar Rp. 241.000.000 masing-masing Rp. 181.600.000 dari retribusi daerah dan Rp. 59.500.000 dari pos Lain-lain PAD yang sah; Distamben, Penanaman dan Lingkungan menyumbang Rp. 402.000.000 masing-masing dari pos Pajak Daerah Rp. 389.350.000 dan pos Retribusi Daerah Rp. 12.650.000; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM menyumbang Rp.

2.243.500.000 masing-masing dari pos Retribusi Daerah Rp. 114.000.000 dan dari pos Lain-lain PAD yang Sah Rp. 2.129.500.000;

Selain itu Disos, Nakertrans dan Pemberdayaan Masyarakat menyumbang Rp. 30.000.000 dari pos Lain-lain PAD yang Sah; Dinas Pekerjaan Umum dan Pertamanan menyumbang Rp. 150.000.000 dari pos Retribusi Daerah; Dispar, Perhubungan dan Telekomunikasi menyumbang Rp. 162.212.000 masing-masing dari pos Retribusi Daerah 103.212.000 dan dari pos Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 59.000.000; serta Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda menyumbang Rp. 34.080.000.-

Dari data di atas dapat dilihat bahwa BPKAD menjadi penyumbang terbesar bagi PAD Kabupaten Sumbawa Barat, yang diikuti oleh Diskoperindag dan UKMM. Dari keseluruhan penerimaan tiap-tiap pos, Lain-lain PAD yang Sah menjadi penyumbang terbesar yang diikuti oleh Retribusi Daerah kemudian Pajak Daerah. Sedangkan Bagian Laba Usaha Daerah belum menyumbangkan apa-apa pada daerah sebab daerah belum memilikinya.

4.4. Peluang-peluang dan Kekuatan Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah haruslah dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang, guna tercapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah tentulah harus teliti dalam mendata dan mengenali segala potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Potensi-potensi yang dimiliki oleh sebuah daerah dalam melakukan pembangunan, tidak hanya mengacu pada potensi sektor sumber daya alam yang dapat meningkatkan bidang ekonomi saja, namun juga harus melihat potensi sumber daya manusia yang ada.

Potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat seperti yang telah dipaparkan di muka, belum sepenuhnya dimanfaatkan sehingga masih membuka peluang dalam hal pengembangan dan peningkatan hasil produksinya. Sektor pertanian yang mempunyai potensi pengembangan 18.892 Ha baru dimanfaatkan 13.735 Ha (72,70 %), perikanan berpotensi 3.136 Ha baru dimanfaatkan 630,5 Ha (26,48 %), peternakan dengan lahan pengembalaan yang dapat menampung 49.901 ekor ternak baru terisi 30.558 ekor ternak (61,24 %), perkebunan dengan potensi 30.269,80 Ha baru dimanfaatkan 2.413,85 Ha (7,97 %).

Melihat potensi sektor pertanian dalam arti luas tersebut dan berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan prediksi potensi berbagai sumberdaya pembangunan yang ada, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat mencanangkan visi pembangunan dalam lima tahun pertama yaitu *Kabupaten Sumbawa Barat Membangun Pelayanan Publik Prima dan Produktivitas Pertanian Menuju Agroindustri*. Untuk memujudkan visi

pembangunan tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut :

1. Memanfaatkan potensi geografis dan sumberdaya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan.
2. Mengelola perekonomian daerah secara efektif dan efisien agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
3. Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing dan partisipatif yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.
4. Menyediakan prasarana dan sarana pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menuju sistem kabupaten kota terintegrasi.
5. Menata sistem pemerintahan yang professional, baik, bersih dan transparan, demokratis dan bertanggung jawab.

Untuk menjabarkan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat yaitu :

1. Merealisasikan penggunaan potensi geografis dan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui secara optimal.
2. Menggunakan potensi geografis dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui secara efisien dan bertanggung jawab.
3. Menciptakan kegiatan ekonomi daerah yang sesuai dengan keunggulan komparatif sumberdaya pada setiap bagian wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

4. Menciptakan suasana kondusif agar investor dan pihak lainnya mau dan mampu menanamkan modalnya dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Mempedomani tata nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya dalam membina sumberdaya manusia.
6. Menciptakan sumberdaya manusia yang kreatif, berdaya saing tinggi dan partisipatif dalam melaksanakan pembangunan.
7. Menyediakan prasarana dan sarana sosial ekonomi, serta teknologi tepat guna berbasis kepada pemanfaatan sumberdaya lokal untuk mewujudkan sistem kabupaten kota terintegrasi.
8. Menyediakan prasarana dan sarana sosial budaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan kemajuan pembangunan.
9. Mewujudkan lembaga pemerintahan yang transparan dan demokratis dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
10. Menciptakan aparatur pemerintahan yang profesional, baik, bersih, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wakil Bupati Sumbawa Barat dan beberapa tokoh masyarakat di sana, diketahui bahwa sektor pertambangan merupakan sektor penarik investor terbesar untuk saat ini. Selain PT. NNT yang telah mengeksploitasi emas, dan tembaga, kini perusahaan multinasional lainnya yaitu PT. Indotan tengah bersiap-siap untuk mengeksploitasi bahan tambang yang sama di lokasi yang berbeda di

Kabupaten Sumbawa Barat. Tak heranlah kalau sektor pertambangan merupakan sektor yang paling memberi pengaruh pada peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumbawa Barat.

4.5. Kelemahan Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan

Sebagai kabupaten yang baru terbentuk, pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat masih terdapat berbagai macam kendala yang merupakan kelemahan pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan di daerahnya. Salah satunya adalah masih kurangnya infrastruktur pemerintah dalam melayani masyarakat dan juga kelemahan terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa Barat adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan indikator derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan pendapatan perkapita masyarakat.

Derajat kesehatan masyarakat diukur dari tingginya angka kematian bayi yaitu 35 per 1000 kelahiran dan juga umur harapan hidup masyarakat yang mencapai 56,0 tahun. Tingkat pendidikan masyarakat diukur berdasarkan angka rata-rata lama sekolah, yang mana di Kabupaten Sumbawa Barat tingkat pendidikan masyarakat hanya mencapai 6,80 tahun. Itu artinya rata-rata penduduk Kabupaten Sumbawa Barat hanya berpendidikan sebatas tingkat SD saja. Untuk pendapatan perkapita masyarakat, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki pendapatan perkapita yang relatif cukup tinggi yaitu Rp. 2.361.209,00.

Angka tersebut setidaknya jauh lebih tinggi dari pendapatan perkapita provinsi NTB secara umum yang hanya mencapai Rp.1,3 juta. Nilai IPM Kabupaten Sumbawa Barat yang mencapai 61,9 (skala 0-100) setidaknya berada di atas nilai rata-rata IPM Provinsi NTB yang mencapai 60,6. Namun keadaan tersebut tidak dapat terlalu dibanggakan sebab nilai IPM Provinsi NTB berada pada urutan 33 nasional.

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia tersebut membuat pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam hal ini Bupati, mencanangkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia sebagai program utama pemerintahannya. Hal tersebut terlihat pada arah pengelolaan belanja daerah untuk lima tahun ke depan dengan lebih memprioritaskan pada pembiayaan kegiatan pembangunan (belanja publik) daripada pembiayaan kegiatan rutin (belanja pegawai), dengan kisaran perbandingan 60-70 % untuk anggaran pembangunan dan 30-40 % untuk kegiatan rutin pada setiap tahunnya. Dari sejumlah anggaran pembangunan tersebut maka anggaran yang dialokasikan untuk bidang pelayanan dasar kebutuhan masyarakat yang meliputi infrastruktur pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum lainnya sebesar 70 %, sedangkan 30 %-nya dianggarkan untuk bidang pemberdayaan potensi/sektor unggulan daerah, yang meliputi infrastruktur potensi daerah, kapasitas sumberdaya manusia, produk unggulan dan pasar.

Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada program peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama dari segi pendidikan dan

kesehatan, semakin jelas dengan dikeluarkannya kebijakan biaya pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

“Di Kabupaten Sumbawa Barat harus rata-rata tamat SMA karena tidak ada lagi *Drop Out*. Apa lagi alasannya DO, membantu orang tua tidak boleh, untuk apa sebab berobat sudah gratis. Inilah yang dikatakan *basic needs* oleh Abraham Maslow. *Basic needs* nya sudah kita penuhi jadi apalagi alasannya (untuk tidak sekolah; *penulis*)”,

Kata Zulkifli Muhadli, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dalam sambutannya pada kegiatan Musyawarah Pembangunan Daerah beberapa waktu lalu di Taliwang.

Selain kualitas sumberdaya manusia secara umum, kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan juga dirasa masih rendah yang ditandai dengan masih banyaknya pejabat-pejabat eselon yang masih belum terisi dan diperlukan dalam menjalankan pemerintahan. Untuk itulah setiap dinas yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat berusaha untuk meng-*Up Grade* kualitas SDM nya melalui pelatihan-pelatihan, tugas belajar, bintek, diklat, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

“Kebijakan bidang kepegawaian di Kabupaten Sumbawa Barat saat ini adalah tinggi komitmen dari Bupati serta adanya program peningkatan kualitas para aparatnya yang berijazah S1 menjadi Magister dengan bekerja sama dengan universitas-universitas terdekat. Untuk bidang tugas teknis seperti tenaga kesehatan, PU, pertanian, dan perencana, pmda rencanya akan bekerja sama dengan Bappenas untuk mengirimkan aparatnya guna melakukan tugas belajar ke luar negeri dengan berbagai ketentuan yang telah diatur”,

ujar salah seorang pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu.

Selain kelemahan dalam bidang infrastuktur dan kualitas sumberdaya manusia di atas, masih ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat dalam mencapai tujuannya yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah (Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2005):

1. Kondisi perekonomian daerah, khususnya sektor pertanian dalam arti luas, di mana hampir di semua bidang mengalami stagnasi dan atau pertumbuhan yang relatif lambat.
2. Belum berkembangnya produk-produk unggulan/andalan yang berbasis sumberdaya alam yang menjadi prasyarat pengembangan agroindustri/agribisnis.
3. Pembangunan infrastruktur daerah yang sangat terbatas, begitu juga infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Belum terjadinya pertumbuhan di bidang industri yang merupakan lanjutan proses sektor primer, dimana pada tahapan proses inilah yang akan memberi nilai tambah yang tinggi terhadap hasil pertanian yang telah ada.
5. Posisi perekonomian daerah terhadap wilayah regional rata-rata dalam posisi maju tertekan dan di beberapa bidang dalam posisi relatif tertinggal, seperti lapangan usaha jasa perdagangan dan usaha keuangan, sedangkan sektor-sektor usaha ini merupakan embrio berkembangnya sektor tersier.

Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Zulkifli Muhadli menyatakan,

"Kita membutuhkan sektor jasa untuk bisa berkembang. Kita akan susah berkembang jika kita hanya mengandalkan sektor primer yaitu masih tergantung pada alam. Kita ingin melangkah pada sektor skunder, yang sudah menggabungkan antara industri dan pertanian yang dinamakan dengan agroindustri, dimana di dalamnya sudah mulai ada *manufacturing*. Untuk tahap selanjutnya kita akan melangkah pada sektor ketiga yaitu sektor tersier dimana masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada sektor pertanian namun sudah mulai beralih pada bidang jasa. Namun untuk melangkah pada sektor tersebut kita masih sulit karena mengalami kendala pada jumlah penduduk yang masih sangat sedikit yaitu sekitar 100.000 jiwa".

Untuk itulah, saat ini konsentrasi pemerintah tertuju pada pembangunan sektor skunder yaitu industri, sebagaimana yang dirumuskan dalam visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumbawa Barat yaitu *Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah industri dan perdagangan andalan*. Industri yang dimaksud disini adalah pengembangan dari agroindustri (industri hasil pertanian) ke industri substitusi impor sebagai pendukung kemandirian agroindustri, sedangkan perdagangan yang dimaksudkan sebagai langkah lanjutan dari pengembangan potensi daerah yang berbasis sektor sekunder (industri) ke sektor tersier.

Industri dan perdagangan andalan menjadi pilihan agar menjadi focus utama dalam perencanaan arah kebijakan pembangunan jangka panjang, karena fakta dan data menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat saat ini bertumpu pada kekuatan sektor primer (terutama pertanian dalam arti luas), sehingga kemajuan pembangunan daerah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat di masa datang, perlu dilakukan dorongan

yang kuat untuk meningkatkan nilai tambah dan hasil sektor primer (terutama pertanian dalam arti luas). Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan industri olahan dan industri pendukungnya, serta pengembangan perdagangan hasil industri sebagai daya dorong dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB-VV PENUTUP

Dalam Bab Penutup, penulis mengisinya dengan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi beberapa poin yang dapat penulis ambil sebagai inti dari apa yang telah diteliti dan juga telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Saran lebih mengarah pada saran-saran penulis kepada beragi pihak terutama para akademisi yang tertarik untuk lebih mengembangkan bidang ilmu pemerintahan serta kepada kepada pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai tujuan terselenggaranya pemerintahan yaitu kesejahteraan masyarakatnya.

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan desentralisasi yang diwujudkan dengan pemberian otonomi (hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada) kepada daerah otonom, dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada daerah unutk melakukan kreasi sesuai dengan tradisi-tradisi yang berkembang di daerahnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sebagaimana tujuan akhir diselenggarakannya sebuah pemerintahan

Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan

didaerahnya. Kreativitas, inovasi, dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat. Dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kabupaten yang baru saja terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian penulis di Kabupaten Sumbawa Barat, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sumber Daya Alam di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi yang sangat besar dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan saat ini dan untuk masa yang akan datang. Potensi SDA yang menjadi penyumbang devisa terbesar bagi daerah di Kabupaten Sumbawa Barat untuk saat ini adalah dari sektor pertambangan, dan ke depannya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mempersiapkan sektor sekunder (agroindustri) sebagai penunjang utama penyelenggaraan pemerintahan.

Potensi SDA daerah yang masih besar, untuk saat ini belum sepenuhnya bisa dieksploitasi/dimanfaatkan sepenuhnya, karena keterbatasan anggaran daerah.

2. Sumberdaya Manusia di Kabupaten Sumbawa Barat jika ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya masih belum begitu tinggi. Untuk itulah, dalam babak awal penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan Indeks Pembangunan Manusia masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat sebagai prioritas utama pembangunan di daerah tersebut. Kebijakan tersebut secara nyata dapat dilihat pada program Pengobatan Kesehatan Gratis untuk seluruh warga Kabupaten Sumbawa Barat, biaya Pendidikan Gratis bagi penduduk yang mengenyam pendidikan dari tingkat TK hingga SMU, biaya pembuatan KTP dan Akta Kelahiran Gratis, Penghapusan Retribusi Kebersihan/Persampahan, serta ditunjang oleh Program Sejuta Pohon yang merupakan salah satu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya.
3. Untuk saat ini pemerintah daerah masih mengandalkan sektor pertambangan sebagai andalan sebagai sumber utama dalam membiayai pembangunan. Namun ke depannya, sektor pertanian-industri (agroindustri) akan menjadi andalan Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yang selanjutnya akan melangkah pada sektor tersier (jasa). Hal tersebut dilakukan karena untuk sebagian

besar masyarakat daerah tersebut bergelut dengan sektor pertanian sebagai sumber pokok penghidupannya dan keluarganya.

4. Faktor kualitas sumberdaya manusia merupakan faktor kelemahan terbesar Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengarahkan pembangunan saat ini. Dimana rata-rata lama pendidikan masyarakat adalah 6,8 tahun atau hanya sebatas kelas 6 SD saja. Oleh karena itulah, pemerintah daerah mencanangkan wajib belajar hingga tingkat SMU kepada masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan bebas biaya pendidikan hingga tingkat pendidikan tersebut.

5.2. Saran

Dalam penulisan saran, penulis membagi saran yang dibuat menjadi dua, yang masing-masing ditujukan kepada :

1) Akademisi

1. Penelitian yang dilakukan hendaknya mengenai masalah-masalah yang dapat menambah daya analisis serta meningkatkan derajat keilmuan seorang mahasiswa sebelum dia benar-benar turun di masyarakat.
2. Hasil penelitian yang dicapai diharapkan mampu untuk memancing animo peneliti-peneliti yang lain untuk lebih menggali intisari dari permasalahan yang ada sehingga ke depannya dapat menambah khazanah keilmuan pada umumnya dan dalam bidang ilmu pemerintahan pada khususnya.

2) Pemerintah Daerah

1. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, hendaknya pemerintah daerah lebih menggali potensi yang dimilikinya serta memancing partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan adalah betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki, pemerintah daerah hendaknya aktif dalam mempromosikan potensi yang dimiliki tersebut serta tidak hanya menunggu datangnya pihak ketiga (investor) untuk menanamkan modalnya di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozari. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial*. Airlangga University Press. Surabaya, 2001.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005.
- Harahap, Abdul Asri. *Manajemen & Resolusi Konflik Pilkada*. Pustaka Cidesindo. Jakarta, 2005.
- Marbun, B.N. *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita, Perkembangan Otda sejak Zaman Kolonial sampai Saat Ini*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2005.
- Munir, Badrul. *Babak Baru Pembangunan Daerah, Gagasan, Dilema, dan Tantangan*. Lembaga Kajian Strategi Sumberdaya (LeKaSS). Mataram, 2000.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1983.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta, 2005.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. *Reinventing Government; Mewirusahaakan Birokrasi, Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik*. Pustaka Binaman Presindo. Jakarta, 1999.
- Rozaki, Abdur. dkk. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. IRE Press. Yogyakarta, 2005.

Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Grasindo, 2004.

Sarundajang, S.H. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2002.

_____, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Kata Hasta Pustaka, 2005

Susanto, Heri. dkk. *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal, Pikiran serta Konsepsi Syauckani H.R.* Millenium Publisher. Jakarta, 2003.

Widodo, Joko. *Good Governance, Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia. Surabaya, 2001.

Dokumen-Dokumen:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Lain-lain:

www.kompas.com

www.pototano.tripod.com